

B A B 2

TINJAUAN PUSTAKA

Bab dua menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang dilakukan terkait dengan penelitian yang meliputi kerangka konsep dan kerangka teori. Globalisasi merupakan konsep yang penting dalam pembahasan ini, dimana fenomena persebaran isu yang dilakukan oleh gerakan FG sangat didukung dengan perkembangan teknologi dan informasi. Hal ini memastikan isu-isu yang disuarakan dapat tersampaikan ke warga dunia di berbagai belahan bumi yang berbeda sehingga menimbulkan solidaritas yang memberi pengaruh pada kondisi perkembangan isu-isu kemanusiaan khususnya di kawasan Jalur Gaza.

2.1. Kerangka Konsep

2.1.1. Globalisasi

Globalisasi telah membuat perkembangan dalam analisis makrososiologi. Struktur sosial telah mengalami transnasionalisasi serta pergeseran epistemologi yang dibutuhkan dalam perubahan ontologi yang terjadi saat ini.¹⁰ Globalisasi didefinisikan sebagai :

*"an economic, political, social, and ideological phenomenon which carries with it unanticipated, often contradictory, and polarizing consequences." This process of globalization is part of an "ever more interdependent world," where political, economic, social, and cultural relationships are not restricted to territorial boundaries or to state actors and no state or entity is unaffected by activities outside its direct control.*¹¹

¹⁰ Beyond Nation-State Paradigms: Globalization, Sociology, and the Challenge of Transnational Studies Author(s): William I. Robinson Source: Sociological Forum, Vol. 13, No. 4 (Dec., 1998), pp. 561-594 Published by: Springer Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/684864> Accessed: 25/10/2009 23:27

¹¹ Terjemahan bebas: sebuah fenomena politik, sosial dan ideologis yang tidak terantisipasi, kerap kali bersifat kontradiksi dan mempolarisasikan konsekuensi-konsekuensi." Proses globalisasi ini merupakan bagian dari sebuah 'dunia yang selalu saling ketergantungan', dimana hubungan politik, ekonomi, social dan budaya tidak dibatasi oleh batas-batas territorial ataupun aktor Negara serta tidak ada Negara ataupun entitas yang tidak dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas dari luar yang mengontrol secara langsung) Globalization and Human Rights Author(s): Robert McCorquodale and Richard Fairbrother Source: Human Rights Quarterly,

Fenomena ekonomi, politik dan sosial dalam isu-isu yang muncul dalam sejarah konflik Palestina khususnya Jalur Gaza merupakan faktor penting dalam menganalisis penyebab gagalnya proses-proses perdamaian yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk PBB. Perebutan pengaruh di kalangan elite Palestina, kekayaan alam di Gaza serta isu-isu agama dan ras menjadi penyebab gagalnya upaya-upyaa perdamaian yang berjalan dalam beberapa dekade terakhir ini. Fenomena-fenomena tersebut saling terkait sehingga membawa perannya masing-masing dalam penentuan masa depan perdamaian di kawasan ini.

Terkait penelitian seputar globalisasi, Gregg Barak melakukan pembahasan seputar dampak globalisasi dalam kejahatan maupun kontrol terhadap kejahatan pada level nasional maupun global (2001)¹² Beck mengemukakan bahwa, "*globality is an unavoidable condition of human intercourse at the close of the twentieth century*".¹³ Kondisi global merupakan hal yang tak terhindarkan dan melekat dalam keberadaan manusia abad ini, sehingga fenomena-fenomena kejahatan yang ada, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan isu-isu gerakan sosial yang menyertainya saling terkait dalam perkembangannya satu sama lain. Terkait aspek spasial, globalisasi memiliki fokus yang sangat besar sebagai konstruksi skala dan jaringan dalam upaya pembedaan seputar pembahasan globalisasi kontemporer.¹⁴ Globalisasi menurut Marx yang dikutip oleh Alex Dupuy (1995) merupakan :

".. represents the tendency of capitalism to eliminate all spatial barriers to the production and accumulation of capital and to reconfigure the territorial organization of production and

Vol. 21, No. 3 (Aug., 1999), pp. 735-766 Published by: The Johns Hopkins University Press Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/762672> Accessed: 26/10/2009 00:02

¹² Crime and Crime Control in Age of Globalization : A Theoretical Dissection of Gregg Barak. Eastern Michigan University. Critical Criminology 10: 57–72. 2001 Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands.

¹³ Review: Beyond the Deluge? Politics of Globalization Author(s): Ronaldo Munck Reviewed work(s): Globalization by M. Waters Globalization. A Critical Introduction by A. Scholte What Is Globalization? by U. Beck The Globalization Syndrome by J. Mittelman Globalization and Social Policy by N. Yeates ... Source: Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 581, Globalization and Democracy (May, 2002), pp. 172-181 Published by: Sage Publications, Inc. in association with the American Academy of Political and Social Science Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/1049715> Accessed: 26/10/2009 00:14

¹⁴ The Spaces and Times of Globalization: Place, Scale, Networks, and Positionality Author(s): Eric Sheppard Source: Economic Geography, Vol. 78, No. 3 (Jul., 2002), pp. 307-330 Published by: Clark University Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/4140812> Accessed: 25/10/2009 22:54

*exchange without eliminating the uneven and unequal development of that mode of production within and between nation-states”.*¹⁵

Kapitalisme yang melibatkan negara-negara yang memiliki kekuatan dominan di dunia menyebabkan kondisi keadilan tampak jelas pada negara-negara dijadikan objek dalam kondisi yang ada. Isu kapitalisme merupakan hal yang tidak tampak dalam isu konflik di Palestina, karena kerap kali tertutup dengan isu ideologi. Namun isu kapitalisme ini tampak jelas, terutama sejak bermunculannya perusahaan-perusahaan Inggris dan Amerika Serikat yang berinvestasi di Gaza pasca invasi Israel pada tahun 2008 yang menyebabkan kerusakan yang parah pada infrastruktur negara tersebut.

Globalisasi merupakan istilah yang kerap digunakan dalam pembahasan seputar kebijakan internasional pasca perang dunia ke II terkait keruntuhan finansial yang terjadi pada masa itu.¹⁶ Menurut Held (1999), globalisasi merupakan sebuah proses yang dipicu untuk menghasilkan perluasan batas aliran barang, jasa, uang, informasi dan kebudayaan¹⁷ Philip G. Cerny (1995) mendefinisikan globalisasi sebagai seperangkat proses dan struktur ekonomi dan politik yang berasal dari perubahan karakter barang dan aset terkait situasi ekonomi politik internasional.¹⁸ Douglas Kellner (2002) melakukan telaah kritis seputar transformasi fundamental globalisasi dalam ekonomi, politik dan budaya dalam kerangka berpikir dialektika dimana :

“...of a view that theorizes globalization as a highly complex, contradictory, and thus ambiguous set of institutions and social

¹⁵ Terjemahan bebas: “...mewakili kecenderungan kapitalisme untuk mengeliminasi seluruh hambatan-hambatan spasial bagi produksi dan akumulasi modal dan untuk mekonfigurasi kembali teritorial organisasi atas produksi dan pertukaran tanpa mengeliminasi perkembangan yang tidak merata dan tidak setara dari cara produksi didalam dan diantara nation-state Thoughts on Globalization, Marxism, and the Left Author(s): Alex Dupuy Source: Latin American Perspectives, Vol. 25, No. 6 (Nov., 1998), pp. 55-58 Published by: Sage Publications, Inc. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2634206> Accessed: 26/10/2009 00:10

¹⁶ Justice Unbound? Globalization, States and the Transformation of the Social Bond Author(s): Richard Devetak and Richard Higgott Source: International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol. 75, No. 3 (Jul., 1999), pp. 483-498 Published by: Blackwell Publishing on behalf of the Royal Institute of International Affairs Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2623632> Accessed: 25/10/2009 23:13

¹⁷ Is Globalization Civilizing, Destructive or Feeble? A Critique of Five Key Debates in the Social Science Literature Author(s): Mauro F. Guillen Source: Annual Review of Sociology, Vol. 27 (2001), pp. 235-260 Published by: Annual Reviews Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2678621> Accessed: 25/10/2009 23:46

¹⁸ Globalization and the Changing Logic of Collective Action Author(s): Philip G. Cerny Source: International Organization, Vol. 49, No. 4 (Autumn, 1995), pp. 595-625 Published by: The MIT Press Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2706920> Accessed: 25/10/2009 23:47

*relations, as well as one involving flows of goods, services, ideas, technologies, cultural forms, and people (see Appadurai 1996).*¹⁹

Dari pemaparan-pemaparan diatas, dapat dilihat bahwa isu globalisasi telah demikian berkembang dalam skala yang lebih luas. Konsep globalisasi bukan hanya dibatasi oleh definisi finansial, namun juga meliputi kondisi politik internasional sebagaimana yang tampak dalam isu-isu hak-hak asasi manusia yang berkembang. Globalisasi menyebabkan pertukaran ide-ide dan kebudayaan berkembang dengan sangat cepat, sehingga transfer perkembangan-perkembangan di berbagai belahan dunia dapat dengan cepat dilakukan sebagaimana tampak dalam isu gerakan sosial yang mempromosikan perdamaian.

Christopher Chase-Dunn, Yukio Kawano, Benjamin D. Brewer (2000) mengangkat pembahasan seputar globalisasi sebagai sebuah ideologi politik kontemporer terkait dengan globalisasi struktural.²⁰ Ali Farazmand (1999) mengkaitkan implikasi globalisasi terhadap administrasi publik.²¹ E. Osei Kwadwo (2004) mengutip Paul Hirst and Grahame Thompson's (1996) menyebutkan globalisasi sebagai

"a fashionable concept in the social sciences, a core dictum in the prescriptions of management gurus, and a catch-phrase for journalists and politicians of every stripe" (p. 1). This process of globalization is part of an emerging neoliberal hegemonic

¹⁹Terjemahan bebas: "... dari sebuah pandangan bahwa berteori terkait globalisasi sebagai sesuatu yang sangat kompleks, bertentangan dan menjadi perangkat ambigu dari institusi dan hubungan social, sebagaimana satu hal terkait dengan aliran barang, jasa, ide teknologi, bentuk-bentuk cultural, dan manusia (lihat Appadurai 1996). Theorizing Globalization Author(s): Douglas Kellner Source: Sociological Theory, Vol. 20, No. 3 (Nov., 2002), pp. 285-305 Published by: American Sociological Association Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3108613> Accessed: 25/10/2009 23:09

²⁰ Trade Globalization since 1795: Waves of Integration in the World-System Author(s): Christopher Chase-Dunn, Yukio Kawano, Benjamin D. Brewer Source: American Sociological Review, Vol. 65, No. 1, Looking Forward, Looking Back: Continuity and Change at the Turn of the Millenium (Feb., 2000), pp. 77-95 Published by: American Sociological Association Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2657290> Accessed: 25/10/2009 23:48

²¹ Globalization and Public Administration Author(s): Ali Farazmand Source: Public Administration Review, Vol. 59, No. 6 (Nov. - Dec., 1999), pp. 509-522 Published by: Blackwell Publishing on behalf of the American Society for Public Administration Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3110299> Accessed: 25/10/2009 23:36

*discourse informed by a strong reliance on the market and in accordance with the logic of capital.*²²

Konsep globalisasi merupakan definisi yang tepat digunakan dalam ilmu sosial terkait kegunaannya dalam menganalisis fenomena sosial yang ada. Para pelaku-pelaku fenomena sosial melakukan pengembangan-pengembangan terhadap isu-isu yang didukung oleh globalisasi dalam memudahkan persebaran isu dan memastikan seluruh sumber daya dikerahkan dalam memenuhi tujuan-tujuan yang diinginkan. Dalam konteks gerakan Free Gaza, globalisasi memastikan bahwa isu-isu kemanusiaan yang diusung oleh gerakan ini sampai kepada warga sipil dunia, dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang mereka miliki sebagai upaya untuk melawan pendudukan dengan cara-cara non kekerasan, John S. Levin (2001) memandang globalisasi merefleksikan persepsi terkait ruang sosial dan kekuatan teknologi didalamnya, sebagaimana dijabarkan dalam kutipan berikut :

*"that the world is rapidly being moulded into a shared social space by economic and technological forces and that developments in one region of the world can have profound consequences for the life chances of individuals or communities on the other side of the globe" (Held et al. 1999, p. 1). It may be that consciousness of a global society, culture, and economy and global interdependence are the cornerstones of globalization (Robertson 1992)*²³

Dunia berkembang dengan pesat. Penyebaran informasi yang dilakukan oleh gerakan FG melalui berbagai media informasi, terutama internet,

²² Terjemahan bebas: " Sebuah konsep modern dalam ilmu-ilmu social, sebuah keputusan inti dalam arah pengaturan, dan sebuah ungkapan-tangkap bagi jurnalis dan politisi dalam setiap jalur (hlm.1). Proses globalisasi ini merupakan sebuah bagian dari kemunculan hegemoni neoliberal yang diinformasikan oleh kepercayaan kuat terhadap pasar yang sesuai dengan logika dari modal Anti-Globalization Forces, the Politics of Resistance, and Africa: Promises and Perils Author(s): E. Osei Kwadwo Prempeh Source: Journal of Black Studies, Vol. 34, No. 4 (Mar., 2004), pp. 580-598 Published by: Sage Publications, Inc. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3180897> Accessed: 25/10/2009 22:53

²³ Terjemahan bebas : " Dunia yang berkembang dengan sangat cepat menjadi sebuah ruang social ekonomi dan kekuatan teknologi yang berkembang sehingga berdampak pada kesempatan hidup individu ataupun komunitas di belahan dunia yang lain." (Held et al. 1999, hlm. 1). Hal tersebut merupakan kesadaran masyarakat global, kebudayaan, ekonomi serta saling ketergantungan global pada sebuah sudut dalam globalisasi (Robertson 1992). Public Policy, Community Colleges, and the Path to Globalization Author(s): John S. Levin Source: Higher Education, Vol. 42, No. 2 (Sep., 2001), pp. 237-262 Published by: Springer Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3448068> Accessed: 25/10/2009 22:49

menyebabkan konsekuensi meningkatnya kesadaran isu-isu pelanggaran hak-hak asasi manusia di kawasan sekitar Palestina khususnya jalur Gaza. Kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan serta berbagai kejadian sehari-hari yang berlangsung di kawasan tersebut dengan cepat disampaikan ke khalayak pengguna internet melalui tulisan, foto, maupun video. Hal ini meningkatkan kesadaran di kalangan warga sipil dunia, yang menunjukkan fenomena globalisasi dalam isu pendudukan Jalur Gaza oleh pihak Israel.

Sofia Näsström (2003) memandang globalisasi merupakan sebagai solusi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam akibat jarak (gap) yang ada dalam fondasi demokrasi²⁴ Hal ini dipandang tepat, jika melihat kondisi peperangan yang berlarut-larut di kawasan tersebut. Globalisasi dalam konteks gerakan sosial yang mempromosikan peacemaking, dalam konteks pembahasan ini akan dibatasi dalam *Peacemaking Criminology* oleh Fuller, menjadikan gerakan FG sebagai solusi atas permasalahan yang muncul akibat jarak yang ada antara pemerintah dengan warga sipil. Kegiatan gerakan FG memberikan bantuan kemanusiaan secara langsung – hal yang selama ini menjadi kendala masyarakat internasional untuk memberikan sumbangan bahan-bahan kebutuhan pokok ke kawasan tersebut pasca agresi Israel – merupakan gambaran solusi yang dilakukan untuk sedikit mengurangi penderitaan warga Jalur Gaza yang hidup dalam isolasi akibat pendudukan brutal Israel. Robinson (1998) juga menyebutkan bahwa globalisasi merupakan bahasan dalam analisis makrososiologi sebagaimana berikut,

“ Globalization has made it increasingly necessary to break with nation-state centered analysis in macrosociologies. Social structure is becoming transnationalized, and an epistemological shift is required in concurrence with this ontological change. A new interdisciplinary transnational studies should be predicated on a paradigmatic shift in the focus of social inquiry from the nation-state as the basic unit of analysis to the global system as the appropriate unit. Sociology's fundamental contribution to a

²⁴ What Globalization Overshadows Author(s): Sofia Näsström Source: Political Theory, Vol. 31, No. 6 (Dec., 2003), pp. 808-834 Published by: Sage Publications, Inc. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3595713> Accessed: 25/10/2009 22:50

transnational studies should be the study of transnational social structure. This article does not establish a new transnational paradigm. Rather, it surveys and critiques nation-state-centrism in extant paradigms, provides a rationale for a new transnational approach, and proposes a research curriculum of a new transnational studies that may contribute to paradigmatic reconceptualization”²⁵

Globalisasi merupakan pembahasan yang demikian luas, sehingga isu-isu yang terkait didalamnya meliputi hal-hal yang membahas sebuah isu sosial dengan menggunakan unit analisis dasar pada sistem global. Studi seputar *Peacemaking Criminology* ini membahas isu kejahatan dalam aspek global, yakni dunia. Kejahatan terhadap Kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel selama pendudukannya di Palestina yang tidak kunjung mendapatkan penyelesaian tuntas dari kalangan-kalangan dunia yang berwenang menunjukkan betapa pentingnya untuk memetakan kembali aktor-aktor yang dapat turut berperan dalam mempromosikan perdamaian yang melibatkan warga sipil dunia. Rekonseptualisasi paradigmatik juga dilakukan dalam memetakan jenis-jenis kejahatan, dimana kejahatan-kejahatan yang selama ini menjadi isu yang menyebabkan munculnya wacana seputar *Peacemaking Criminology*, dapat diperluas lagi pembahasannya dalam kejahatan dalam skala yang lebih global daripada sekadar ruang pengadilan lokal, yakni kejahatan yang sedang berlangsung di dunia terkait kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berlangsung terus menerus tanpa mendapatkan penyelesaian tuntas dari pihak-pihak maupun lembaga peradilan internasional yang berwenang.

²⁵ Terjemahan bebas: Globalisasi telah menembus batas analisis yang berpusat pada Negara-bangsa dalam analisis sentral makrososiologi. Struktur sosial menjadi sesuatu yang ditransnasionalisasi, dan sebuah pergeseran epistemologis dibutuhkan untuk persetujuan akan perubahan ontologism ini. Sebuah studi transnasional harus didasarkan pada pergeseran paradigmatik dalam focus penyelidikan sosial dari negara-bangsa sebagai unit analisis dasar pada system global, sebagai unit yang sesuai. Kontribusi fundamental sosiologi pada sebuah studi transnasional dapat menjadi studi mengenai struktur social transnasional. Tulisan ini tidak mendirikan sebuah paradigmatik transnasional baru. Justru survei dan kritik akan segala sesuatu yang berpusat pada Negara-bangsa pada paradigmatik ini menyediakan sebuah dasar pemikiran bagi pendekatan baru transnasional, dan berkontribusi pada rekonseptualisasi paradigmatik. *Beyond Nation-State Paradigms: Globalization, Sociology, and the Challenge of Transnational Studies* Author(s): William I. Robinson Source: *Sociological Forum*, Vol. 13, No. 4 (Dec., 1998), pp. 561-594 Published by: Springer Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/684864> Accessed: 14/12/2009 23:21

2.1.2. Globalisasi dan Internet

Globalisasi telah menciptakan dunia tanpa batas. Derasnya arus informasi yang berkembang di internet membuka berbagai peluang bagi banyak pihak, serta merupakan sarana sosialisasi yang efektif. Hubungan-hubungan social antar pengguna berbagai fasilitas komunikasi menjadikan sosialisasi nilai-nilai antar wilayah sangat mungkin untuk terjadi sehingga mampu menciptakan perubahan-perubahan tata nilai tertentu, tanpa dibatasi oleh kawasan geografis. Studi berikut merupakan contoh keterkaitan erat antara globalisasi dan internet.

However, globalization and the Internet together are combining to impact how socialization occurs. For example, the Internet appears to be helpful in resocializing Chinese students and scholars in the United States to American behaviors (Melkote and Liu 2000). Sociologists have identified several other impacts on socialization brought about by the Internet. Computing changes such as networked school classrooms and increasing bandwidth have been a factor in changing curriculums that include new ways of learning and more emphasis on social issues. The potential result could ultimately be a reconsideration of the role and purposes of schools (Russell 2000).²⁶

Internet memegang peranan sangat penting dalam globalisasi isu-isu yang diusung oleh gerakan FG. Studi yang dipaparkan dalam kutipan diatas merupakan gambaran bahwa internet memiliki peran penting dalam sosialisasi. Jika pelajar Cina dapat mempelajari perilaku warga Amerika Serikat melalui internet, maka warga dunia mempelajari perilaku brutal Israel dalam media yang sama. Setiap hari, situs-situs berita independen dari organisasi maupun perorangan memberitakan perilaku-perilaku keseharian tentara Israel terhadap warga Palestina, maupun kasus-kasus perebutan lahan secara paksa dan pemblokiran

²⁶ Terjemahan bebas: “ globalisasi dan internet bersama-sama mengkombinasikan pada dampak bagaimana terjadinya sosialisasi. Sebagai contoh, manfaat keberadaan internet dalam mensosialisasikan perilaku Amerika Serikat kepada pelajar dan sarjana Cina di Negara tersebut (Melkote and Liu 2000). Para sosiolog telah mengidentifikasi sejumlah dampak dari sosialisasi yang dibawa oleh internet. Perubahan penggunaan system computer sebagai jaringan ruang kelas serta meningkatnya jumlah informasi yang selama ini menjadi sebuah factor dalam perubahan kurikulum yang meliputi cara baru untuk belajar dan lebih menekankan pada isu-isu social. Hasil potensial akhir dari hal ini dapat menjadi sebuah pertimbangan kembali akan peran dan tujuan sekolah (Russel, 2000).

listrik yang dilakukan atas kawasan Jalur Gaza. Kondisi fasilitas kesehatan yang buruk, pembatasan impor barang serta sulitnya akses pelajar untuk melanjutkan pendidikan merupakan berita-berita yang disosialisasikan setiap hari kepada khalayak ramai di berbagai belahan dunia. Berita-berita menumbuhkan kesadaran dan solidaritas warga-warga belahan dunia lainnya untuk turut mendukung pembebasan atas Jalur Gaza pada khususnya dan Palestina pada umumnya. Penjelasan berikut juga menggambarkan empati yang dikembangkan melalui interaksi secara virtual.

Sociologists interested in the impact of the Internet on socialization processes have also been able to study how a shared sense of reality develops in virtual interactions. For example, Goffman's concepts are not found only in face-to-face interactions. They are also a part of online interactions. Presentation of self occurs on the Internet via the personal home page (Bell 2001, 117–18). People pick and choose various facets of their personalities and lives to present online, or they can present themselves any way they choose to do so. Cyberspace allows participants to play with their identity and create multiple selves online. They present themselves and basic characteristics of race, class, gender identities in various ways (Kendall 2002).

Empati tersebut tidak hanya ditemui dalam interaksi tatap muka, namun terjadi pula dalam interaksi melalui internet. Berbagai macam fitur yang disediakan di internet mengizinkan penggunaannya untuk menggunakan media tersebut secara kreatif dalam menyampaikan pesannya kepada orang-orang yang ditemuinya via online. Situs jejaring sosial *facebook*, misalnya, menyediakan berbagai fitur yang mampu menyampaikan ekspresi dengan berbagai pilihan media yakni melalui fitur percakapan (*chat*), video, catatan, maupun aplikasi-aplikasi lain yang dapat diciptakan sendiri oleh pengguna sesuai kepentingannya. Aktivis pro Palestina misalnya, menciptakan aplikasi-aplikasi gambar yang dapat saling dikirimkan ke sesama pendukung berupa bendera maupun logo-logo kreatif. Dapat pula dengan fitur *cause* yang dapat menghasilkan dana untuk disumbangkan, maupun menciptakan *group* untuk memperoleh dukungan

sebanyak-banyaknya secara virtual. Deskripsi seputar peran internet terkait intraksi yang terjadi didalamnya dilanjutkan sebagai berikut,

“However, other research suggests that the Internet may actually facilitate building social bonds among physically separated people who can share perspectives and connections aside from the familiarity of face-to-face interactions (Chayko 2002). Further research into social interactions on the Internet is a rich field for research and will help us better understand how we relate in the virtual world and how these interactions will impact other aspects of our lives.”²⁷

Internet memfasilitasi terbangunnya ikatan sosial di kalangan pendukung pro Palestina melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan gerakan-gerakan yang ada, khususnya gerakan FG. Mereka saling berbagi informasi setiap hari, melalui *posting* artikel, komentar, maupun chat dengan pendukung-pendukung di berbagai belahan dunia sehingga ikatan sosial terjalin karena interaksi yang rutin tersebut. Interaksi tersebut berpengaruh pada kehidupan mereka di dunia nyata, dimana pandangan mereka tersebut mempengaruhi sikap dan tindakan mereka terhadap kegiatan-kegiatan pro Palestina di wilayah lokal negara masing-masing.

²⁷Terjemahan bebas: Para sosiolog tertarik dalam dampak internet dalam proses sosialisasi yang selama ini juga mampu untuk mempelajari bagaimana sebuah sense of reality yang dibagi berkembang dalam interaksi virtual. Sebagai contoh, konsep-konsep Goffman yang tidak hanya ditemukan dalam interaksi tatap muka. Hal-hal tersebut juga merupakan bagian dari interaksi online. Tampilan diri di internet lewat beranda personal (Bell, 2001, 117-18). Orang mengambil dan memilih berbagai faset dari tampilan mereka secara online, atau mereka dapat menampilkan diri mereka dalam bentuk apapun yang mereka inginkan. Cyberspace memperbolehkan para partisipan untuk bermain dengan identitas mereka sendiri dan menciptakan banyak bentuk diri mereka sendiri secara online. Mereka menampilkan diri mereka sendiri dan karakteristik dasar mereka berupa ras, kelas, gender dan identitas dalam berbagai cara (Kendall 2002). Orang dapat pula bersikap berbeda dari yang mereka lakukan ketika berada di internet, dengan ketika berinteraksi dengan tatap muka (Joinson 1998). Norma-norma online dapat menerima perilaku yang mungkin sesuatu yang tidak dapat diterima saat interaksi dilakukan di dunia nyata. Contohnya, beberapa domain dengan banyak pengguna (MUDs) menciptakan dunia kekerasan virtual dimana karakter diharapkan untuk berkelahi, memperkosa ataupun membunuh karakter online lainnya (Dibell 1999). Bagaimanapun, penelitian lain menyatakan bahwa internet dapat menjadi fasilitas dalam membangun ikatan-ikatan social diantara orang yang terpisah secara fisik namun dapat berbagi perspektif dan koneksi yang familiar dalam hubungan tatap muka (Chayko 2002). Penelitian selanjutnya dalam interaksi social di internet merupakan lingkup yang kaya dalam penelitian dan membantu kita untuk memiliki pemahaman yang lebih baik dalam bagaimana kita berinteraksi dalam dunia virtual dan betapa interaksi ini dapat berdampak pada sisi-sisi lain dalam kehidupan kita. (sumber : The basics of sociology. 2005. Kathy S. Stolley. Westport: Greenwood Press,P.72-73)

2.1.3. Cyber Culture

Interaksi dalam jangka waktu tertentu akan menciptakan sejumlah tata perilaku. Demikian halnya dengan interaksi yang digunakan oleh para pengguna internet, dimana penggunaan internet serta komunikasi yang terjalin menimbulkan ikatan-ikatan tertentu dikalangan pengguna. Hal tersebut merupakan salah satu bagian dari *cyber culture* yang berasosiasi kuat dengan gerakan cultural, sebagaimana dalam kutipan berikut :

*The Oxford English Dictionary is known to have listed the earliest reference of “cyber culture” in 1963 when A.M. Hilton predicted that technology would support social conditions to bring about automation and computerization of society.*²⁸

Prediksi Hamilton mengenai *cyber culture* tersebut sangat tepat menggambarkan fenomena gerakan FG yang jangkauan gerakannya mendunia. Pendukung-pendukung yang dibatasi teritorial wilayah dan zona waktu masing-masing terhubung dengan teknologi informasi. Persebaran informasi melalui internet, baik melalui situs maupun *mailing list* memastikan isu-isu yang disebarkan mendukung kondisi sosial di belahan bumi yang berbeda, dimana mereka tidak menyaksikan peristiwa-peristiwa harian di Jalur Gaza dan sekitarnya.

*The American Heritage Dictionary expanded upon the definition by Oxford, defining cyber culture as a culture stemming from the use of computer networks, as for communications, entertainment work, and business enterprises.*²⁹

Cyber culture yang dibentuk oleh penggunaan internet yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat di dunia. Melalui fungsi dasarnya yang berawal untuk kebutuhan komunikasi, hiburan dan bisnis, kultur ini berkembang menjadi sebuah kultur yang khusus dalam isu-isu tertentu antara lain isu-isu pelanggaran hak-hak asasi manusia. Kultur tersebut terbentuk melalui

²⁸Terjemahan bebas: Dalam Kamus Umum Oxford dikenal mengenai istilah ‘kultur cyber’ dimana pada 1963, AM Hilton telah memprediksi bahwa teknologi akan mendukung kondisi social yang membawa otomatisasi dan komputerisasi masyarakat.

²⁹Terjemahan bebas : Kamus The American Heritage memperluas definisi tersebut dengan mendefinisikan kultur cyber sebagai kebudayaan yang berasal dari penggunaan jaringan computer, sebagai sarana komunitas, hiburan kerja dan usaha bisnis)

interaksi di internet, sehingga memastikan dukungan terus bergulir dan meluas dengan keberadaan penggunaan komputer khususnya untuk berkomunikasi.

It is important to note that “cyber culture” is a reference to online interactions only. Rather, cyber culture transcends the online and offline attitudes people have about the Internet as well as their computing activities in realms of physical places and cyberspace. Cyber culture is endemic to online computers, and increasingly the use of portable IT devices such as cellular phones that allow for uploading and downloading of digital files to and from the Web, taking and sending of digital photos, instant messaging, and so forth. In other words, cyber culture occurs because of and is mediated by computers and other types of IT devices.³⁰

Interaksi online di kalangan pendukung pro pembebasan Palestina terus berkembang dan memiliki daya penyebaran informasi yang cepat seiring dengan perkembangan teknologi yang ada. Penggunaan telepon seluler oleh para aktivis kemanusiaan yang berada di Gaza, yang memiliki fasilitas untuk meng-upload video dan foto ke internet khususnya jejaring sosial, memastikan bahwa isu tersampaikan dengan cepat ke khalayak luas dalam hitungan menit. Kultur ini jelas turut terbantu oleh perangkat-perangkat teknologi informasi lainnya yang memiliki kemampuan rekam dengan kualitas gambar yang baik. Pandangan ini diperkuat kembali dalam kutipan mengenai *cyber culture* berikut,

Cyber culture is associated with social and cultural movements for the advancing of computer and information sciences. It was influenced in the beginning by early Internet users, frequently the inventors and creators of the computer networking technologies. Cyber culture is manifested in many ways including blogs, social networks, online games (especially MMORPGs), chat and messaging programs, bulletin board systems, peer-to-peer

³⁰ Penting dicatat bahwa ‘kultur cyber’ hanya merupakan referensi bagi interaksi di internet. Lebih dari itu, perluasan kultur di internet tersebut melebihi sikap online dan offline orang terkait internet, sebagaimana mereka memperhitungkan aktivitas-aktivitas dalam kondisi lingkungan fisik maupun cyber. Kultur cyber merupakan kondisi endemic pada computer online, dan meningkatnya penggunaan peralatan teknologi informasi yang dapat dipindahkan seperti telepon seluler yang mampu meng-upload dan mengunduh data digital ke situs web, mengambil dan mengirim foto digital, pesan instan, dan sebagainya. Dengan kata lain, kultur cyber terjadi akibat dimediasi oleh computer dan jenis-jenis peralatan teknologi lainnya)

networks and virtual worlds in which people may create and assume the identity of avatars (i.e., fictional digital characters).

Kultur ini terus berkembang di kalangan pengguna internet. Isu Palestina yang yang disebarakan melalui blog-blog personal maupun organisasi, berita-berita seputar kekerasan fisik, sosial dan kultural yang terjadi di kawasan tersebut setiap hari selau diperbaharui dan disebarakan melalui jejaring sosial yang ada dan dapat ditemukan dengan mudah. Fitur-fitur yang dimuat dalam jejaring sosial facebook, misalnya, mampu mengumpulkan belasan ribu pendukung isu pro pembebasan Palestina hanya dalam beberapa hari. Hal ini dikarenakan isu-isu tersebut telah lazim dipublikasi dalam berbagai media yang ada, sehingga kultur tersebut terbentuk dengan interaksi-interaksi yang muncul selama ini. Pendukung pro pembebasan Palestina umumnya menggunakan lambang-lambang yang mengandung unsur bendera Palestina – yakni warna merah, hijau, hitam dan putih – maupun foto-foto yang menampakkan gambar-gambar pendudukan Palestina yang menunjukkan kondisi ketidakadilan yang ada. Pengguna internet ini, umumnya adalah anak-anak muda.

Youth who now use the Internet to engage in such activities exemplify and, whether they know it or not, are helping to define, perpetuate growth, and shape cyber cultural norms. Indeed, the so-called digital youth culture is a subset of cyber culture in that it relies heavily on social networks and other forms of communications by and among youth via IT devices.³¹

Anak-anak muda tersebut mengabdikan banyak waktunya di internet, dan tumbuh dan berkembang bersam informasi-informasi yang diperoleh. Mereka menggunakan perangkat teknologi tersebut dan memastikan bahwa isu-isu

³¹Kultur cyber diasosiasikan dengan gerakan social dan cultural dalam perluasan ilmu pengetahuan computer dan informasi. Hal tersebut dipengaruhi pada permulaannya oleh pengguna internet awal, para investor dan pencipta teknologi jaringan computer. Kultur cyber dimanifestasikan dalam berbagai cara meliputi blog, jejaring sosial, permainan online, chat dan program pesan, system bulletin, jejaring kelompok per kelompok dan dunia virtual dimana orang dapat menciptakan identitas avatar (karakter fiksi digital). Pemuda yang saat ini menggunakan internet terkait dengan aktivitas yang dilakukan itu mencontoh, dan, apakah mereka mengetahui hal tersebut atau tidak, sedang membantu untuk mendefinisikan, mempercepat pertumbuhan dan membentuk norma-norma kultur cyber . Demikian halnya dengan kultur digital pemuda yang terkenal, merupakan sesuatu dalam set dari kultur cyber yang didasarkan pada jejaring sosial dan bentuk- bentuk lain komunikasi oleh dan diantar pemuda melalui perangkat teknologi)
 ENCYCLOPEDIA OF CYBERCRIME. Edited by Samuel C. McQuade, III GREENWOOD PRESS
 Westport, Connecticut • London. P.50

tersampaikan kepada koneksi jejaring sosial yang dimiliki. Anak-anak muda di jalur Gaza, misalnya, melakukan kegiatan chatting secara rutin untuk memperoleh dukungan di belahan dunia lain, menumbuhkan simpati dan mengupayakan warga dunia lain untuk membantu kondisi kultural maupun finansial mereka yang demikian sulit dari waktu ke waktu. Isu listrik di Gaza, misalnya, menyebabkan anak-anak muda di Gaza sulit untuk mengakses internet sehingga tidak dapat berkomunikasi dengan dunia luar. Komunikasi internet merupakan hal yang penting di Gaza terkait akses keluar masuk kawasan yang sangat terbatas.

Anak-anak muda tersebut memberikan informasi kepada masyarakat internasional mengenai kondisi-kondisi nyata di Gaza. Mereka menggalang dana dan mendistribusikan, membuat kantor berita, situs, video-video independen peserta berbagai hal yang merupakan bentuk upaya untuk memperoleh dukungan internasional. Gambar-gambar tersebut kerap dipenuhi dengan kekerasan dan menuai protes, namun demikianlah kondisi yang ada di lapangan. Kehidupan warga jalur Gaza bak sebuah drama, tak terduga dan penuh dengan teror tentara Israel. Dalam perkembangan isunya, aktivitas Pro Palestina kerap pula diasosiasikan dengan aktivitas pro teroris, sehingga istilah ini juga akan dipergunakan dalam definisi konsep dalam penjelasan lebih lanjut dibagian analisis.

By contrast, there is much wider recognition that violent conflicts number among the causes of terrorism and that is reflected in the attention that the resolution of particular conflicts receive, most notably the conflict between Israelis and Palestinians. But what is missing is an appreciation of the role that uncertainty in the interpretation of significant norms of the international political system has played in exacerbating global disorder in the post-cold war world, in internationalizing conflict, and hence, in helping to create the conditions for terrorism with a global reach.³²

³² Terjemahan bebas : Berbeda, terdapat pengakuan yang lebih besar bahwa jumlah konflik kekerasan diantara penyebab terorisme dan hal itu merefleksikan perhatian bahwa resolusi sejumlah konflik tersebut diterima di kalangan Palestina dan Israel. Namun hal yang hilang adalah apresiasi akan peran yang tidak pasti dalam interpretasi norma-norma signifikan dari system politik internasional yang telah bermain dalam memperburuk kekacauan global pasca perang dingin, dalam menginternasionalisasi konflik, dan oleh sebab itu, membantu untuk menciptakan kondisi bagi terorisme dengan pencapaian global)

Isu terorisme mengiringi kegiatan gerakan para komunitas yang pro pada pembebasan Palestina, meski mereka menggunakan cara-cara non kekerasan. Kerjasama yang mereka lakukan dengan elemen-elemen kelompok lokal yang dinilai menggunakan kekerasan menyebabkan aktivitas mereka kerap dihambat dengan alasan terorisme yang digunakan oleh kelompok penguasa dominan. Aktivitas Pro Palestina yang dikhususkan dalam studi mengenai gerakan sosial ini merupakan sebuah upaya gerakan non-kekerasan dalam bentuk fisik, dimana “...as we have seen, there is at least one alternative—nonviolent mass mobilization—that has proven itself a far more effective “weapon of the weak.”³³. Namun hal tersebut masih pula dapat digolongkan sebagai pro teroris dengan keberadaan definisi *cyberterrorism*. Sehingga dalam aktivitas sederhana berupa mengupload video pun, para aktivis dapat mendapatkan peringatan sebagai berikut :

Gambar.1 Bentuk Peringatan Facebook



Gambar peringatan ini merupakan bentuk peringatan (warning) dari facebook, terkait aktivitas pengguna Sameh Brill yang membuat video kompilasi berita yang dipandang menyebabkan kebencian pada Israel. Video itu terdiri dari beberapa seri, yang dikenal dengan nama *The Hidden Truth*. Video tersebut banyak diminati oleh pengguna facebook yang ditandai dengan banyaknya komentar yang muncul. Sameh dilaporkan oleh sesama pengguna facebook, yang meniai video

. Terrorism and Global Disorder Political Violence in the Contemporary World Adrian Guelke. New York: Published in 2006 by I.B.Tauris & Co Ltd P.265-266

³³Arguing about war by Michael Walzer.2004. Virginia: Yale University PressP.135

tersebut melanggar aturan penggunaan facebook. Kultur saling ‘lapor-melaporkan’ ini merupakan hal yang lazim di facebook, karena jejaring sosial ini memberikan fasilitas untuk preferensi tersebut. Jika sesuatu tidak disukai, maka dapat melakukan ‘klik’ pada aplikasi ‘report’ dan orang tersebut akan mendapatkan peringatan, minimal objek yang dianggap megancam itu akan dihapus, hingga yang paling akhir, adalah menghapus akun pembuat objek tersebut. Objek serangan ‘report’ dapat berupa video, grup atau akun itu sendiri. KelomPeringatan tersebut menyebabkan video tersebut dihapus dari facebook. Namun video tersebut masih dapat ditemukan di youtube.

2.1.4. Gerakan Sosial

Gerakan sosial yang diangkat dalam studi kasus fenomena Free Gaza Movement ini dapat digolongkan dalam sebuah gerakan sosial baru sebagaimana yang dikemukakan oleh Tarrow sebagai berikut :

“ The origins of the "new" social movements are said to arise from the student movement of the 1960s, which spread from Berkeley to Paris and Berlin. It marked the beginning of a broader wave of social protest-environmental, feminist, gay and lesbian, consumer, antinuclear, and peace groups-and change that affected virtually all advanced industrial democracies (Tarrow 1989). The new social movements can be considered the archetyp- ical form of postmodern politics-grass roots, protest from below, solidarity, collective identity, affective processes-all in the struggle against the established order outside the "normal" channels (A. Scott 1990; Tarrow 1989).³⁴

³⁴ Kemunculan gerakan sosial ‘baru’ muncul dari gerakan pelajar pada tahun 1960-an, yang disebarkan dari Berkeley hingga Paris dan Berlin. Hal ini ditandai dengan dimulainya gelombang yang lebih luas protes sosial lingkungan, kelompok feminis, gay dan lesbian, konsumen, anti nuklir dan kelompok aktivis serta perubahan yang digolongkan sebagai bentuk politik akar rumput postmodern, protes dari bawah, solidaritas, identitas kolektif, proses-proses afektif – meliputi semua perjuangan melawan orde yang telah mapan diluar jalur-jalur normal). Source: Postmodernism, Protest, and the New Social Movements Author(s): Joel F. Handler Source: Law & Society Review, Vol. 26, No. 4 (1992), pp. 697-732 Published by: Blackwell Publishing on behalf of the Law and Society Association Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3053811> Accessed: 03/06/2010 00:54 .P.719

Gerakan sosial sangat terkait erat dalam definisi globalisasi. Globalisasi berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia, yang memberi perubahan pada gerakan perlawanan di dunia dimana gerakan akar rumput menjadi kian meluas seiring dengan meluasnya sumber daya yang ada. Jeremy Brecher menyatakan

“Just as the corporate and political elites are reaching across national borders to further their agendas, people at the grassroots are connecting their struggles around the world to impose their needs and interests on the global economy. Globalisation from above is generating a worldwide movement of resistance: globalisation from below” (Brecher et al 2000: 10).³⁵

Gerakan sosial memiliki keterkaitan dengan media massa, opini publik, pemerintah serta masyarakat. Sinergi gerakan sosial dengan faktor-faktor lain terkait mampu menggerakkan strategi politik yang ada dalam suatu wilayah negara terkait permasalahan sosial yang diidentifikasi kemunculannya dalam komunitas yang lebih besar. Hal tersebut tampak dalam bagan berikut, yang merupakan hasil dari studi mengenai perkembangan globalisasi dan media massa

Gambar 2. Varian Radikal

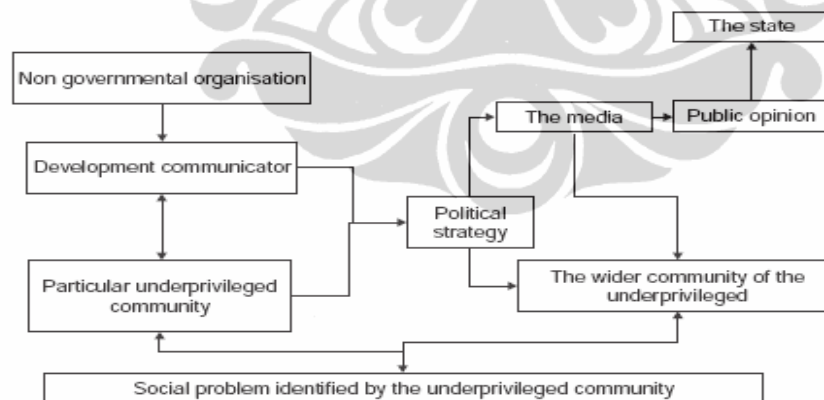


Figure 4.3 The radical variant

Sumber : Sage Publication, 2007³⁶

³⁵ Sebagaimana elit korporasi dan politik yang sedang melintas batas nasional akan agenda-agenda mereka, kalangan akar rumput juga menyambungkan perjuangan mereka ke seluruh dunia untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka dalam ekonomi global. Globalisasi dari atas memperluas gerakan perlawanan di seluruh dunia ; globalisasi dari bawah)

³⁶ Globalization, Development and The Mass Media. Colin Sparks. Sage Publication : London. P.76

Bagan diatas menunjukkan hal-hal yang terkait dengan identifikasi permasalahan sosial. Komponen-komponen meliputi lembaga non pemerintah, masyarakat kurang mampu, strategi politik, media massa, opini publik, serta pihak negara. Dalam isu gerakan sosial yang mempromosikan perdamaian di kawasan Jalur Gaza, komponen-komponen ini saling terkait satu sama lain, beintegrasi untuk memastikan tujuan perdamaian dapat tercapai. Gerakan FG, yang merupakan lembaga non- pemerintah, bekerjasama dengan dengan pihak-pihak lokal terkait baik pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah lokal dan mengintegrasikan setiap isu-isu yang dimunculkan ke media untuk disampaikan kepada khalayak internasional. Hal tersebut membentuk opini publik dan memunculkan simpati terhadap warga Jalur Gaza pada khususnya dan Palestina pada umumnya.

Bert Klandermans (2003) meneliti perbandingan dalam gerakan terkait lingkup dan karakter organisasi serta orientasi kebijakan.³⁷ Kiyoteru Tsutsui and Christine Min Wotipka (2004) membahas tingkat partisipasi para anggota yang bergabung dalam gerakan sosial yang tergabung dalam lembaga non pemerintah hak asasi manusia internasional.³⁸ Deborah Barrett and Charles Kurzman (2004) membahas mengenai gerakan sosial transnasional yang perkembangannya dipengaruhi faktor-faktor yang bukan hanya bersifat lokal, .namun juga global.³⁹ Margaret E. Keck (2002) melakukan penelitian serupa dengan mengemukakan peran aktor transnasional dalam gerakan sosial yang membangun jembatan dalam menembus batas negara dan institusi yang membawa perubahan-

³⁷ A Theoretical Framework for Comparisons of Social Movement Participation Author(s): Bert Klandermans Source: Sociological Forum, Vol. 8, No. 3 (Sep., 1993), pp. 383-402 Published by: Springer Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/684567> Accessed: 27/07/2009 22:26

³⁸ Global Civil Society and the International Human Rights Movement: Citizen Participation in Human Rights International Nongovernmental Organizations Author(s): Kiyoteru Tsutsui and Christine Min Wotipka Source: Social Forces, Vol. 83, No. 2 (Dec., 2004), pp. 587-620 Published by: University of North Carolina Press Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3598341> Accessed: 26/10/2009 00:18

³⁹ Globalizing Social Movement Theory: The Case of Eugenics Author(s): Deborah Barrett and Charles Kurzman Source: Theory and Society, Vol. 33, No. 5 (Oct., 2004), pp. 487-527 Published by: Springer Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/4144884> Accessed: 26/10/2009 00:07

perubahan dalam gerakan sosial tersebut.⁴⁰ Kléber B. Ghimire (2005) mengeksplorasi kompleksitas dan potensi perubahan inheren terkait gelombang baru gerakan global dalam pola kontemporer pengembangan dan globalisasi.⁴¹

*We examine patterns of citizen participation in the global human rights movement through memberships in human rights international nongovernmental organizations (HRINGOs). After showing enormous growth in the number of HRINGOs in recent decades, we investigate country level characteristics leading to greater participation in the international human rights movement.*⁴²

Aktivitas para aktivis hak-hak asasi manusia organisasi non pemerintah jika dikaitkan dalam studi seputar isu *peace making crimiology* dalam aktivitas Gerakan Free Gaza ini menunjukkan tingginya potensi partisipasi warga dunia dalam menyuarakan isu-isu kemanusiaan, khususnya di Jalur Gaza. Gerakan ini merupakan bentuk perilaku kolektif, dimana sekelompok orang dari berbagai latar belakang berkumpul untuk meraih satu tujuan yang disepakati bersama, sebagaimana pernyataan Charles Tilly mengenai perilaku kolektif sebagaimana dikutip dari salah satu bukunya,

“Collective action consists of people's acting together in pursuit of

⁴⁰ Review: Globalization and Collective Action Author(s): Deborah J. Yashar Reviewed work(s): Activists beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics by Margaret E. Keck ; Kathryn Sikkink Has Globalization Gone Too Far? by Dani Rodrik Limits of Citizenship: Migrants and Postnational Membership in Europe by Yasemin Nuhoğlu Soysal Source: Comparative Politics, Vol. 34, No. 3 (Apr., 2002), pp. 355-375 Published by: Ph.D. Program in Political Science of the City University of New York Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/4146958> Accessed: 26/10/2009 00:00

⁴¹ The Contemporary Global Social Movements: Emergent Proposals, Connectivity and Development Implications. Kléber B. Ghimire. Civil Society and Social Movements Programme Paper Number 19 August 2005. United Nations Research Institute for Social Development

⁴² Terjemahan bebas : Kami memeriksa pola partisipasi dalam gerakan hak-hak asasi manusia global (HRINGOs). Setelah menunjukkan pertumbuhan yang sangat besar dalam jumlah HRINGOs dalam beberapa decade terakhir ini, kami menginvestigasi tingkat karakteristik yang membawa para partisipasi yang lebih besar dalam gerakan hak-hak asasi manusia internasional)

Global Civil Society and the International Human Rights Movement: Citizen Participation in Human Rights International Nongovernmental Organizations Author(s): Kiyoteru Tsutsui and Christine Min Wotipka Source: Social Forces, Vol. 83, No. 2 (Dec., 2004), pp. 587-620 Published by: University of North Carolina Press Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3598341> Accessed: 03/11/2009 01:53

common interests. Collective action results from changing combinations of interests, organization, mobilization and opportunity."⁴³

2.2. Kerangka Teori

2.2.1. Studi Seputar Peperangan

Konflik seputar penelitian ini erat kaitannya dengan aspek-aspek seputar peperangan yang telah terjadi dalam beberapa dekade belakangan ini. Oleh karena itu penting untuk mendeskripsikan kembali peperangan yang telah terjadi, serta perangkat-perangkat lembaga solusi konflik dunia yang menunjukkan ketidakmampuan dalam menyelesaikan konflik peperangan yang ada, sehingga memunculkan gerakan-gerakan sosial dan menumbuhkan solidaritas di kalangan warga dunia. Peristiwa peperangan yang ada di dunia erat dengan aspek politis dimana ,

*“Genocides and politicides are the promotion, execution, and/or implied consent of sustained policies by governing elites or their agents – or, in the case of civil war, either of the contending authorities – that are intended to destroy, in whole or part, a communal, political, or politicized ethnic group.”*⁴⁴

Peperangan di Jalur Gaza merupakan hal yang bersifat historis politik. Kekayaan alam, kebencian yang diwariskan turun temurun, doktrin-doktrin keagamaan, serta kepentingan-kepentingan lainnya bersatu padu membentuk benang kusut dalam upaya penyelesaian konflik Palestina. Berikut merupakan sejarah peperangan di wilayah Timur Tengah sejak tahun 1945 atau pasca perang

⁴³ Perilaku kolektif terdiri dari sekelompok orang yang bersama-sama bertindak untuk meraih kepentingan bersama. Perilaku kolektif merupakan hasil dari kombinasi sedang berubah terkait aspek kepentingan, organisasi, mobilisasi dan kesempatan. From Mobilization to Revolution. Charles Tilly. University of Michigan. March, 1977. Center for Research on Social Organization University of Michigan 330 Packard Street Ann Arbor, Michigan 48104. p.11

⁴⁴ Terjemahan Bebas : Genosida dan kegiatan politik adalah promosi, eksekusi dan/atau secara tidak langsung mengizinkan kebijakan berkesinambungan oleh elit pemerintah dan agen mereka – dan, dalam kasus perang sipil, merupakan pendapat otoritas – yang bertujuan untuk menghancurkan, dalam keseluruhan atau sebagian, sesuatu yang komunal, politis, atau politisasi kelompok etnis)

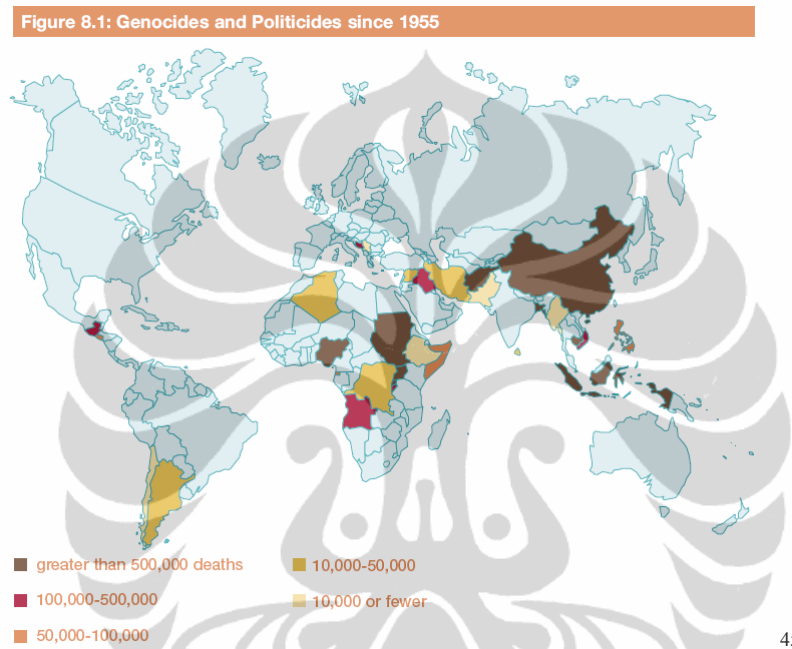
dunia II, yang juga merupakan benang merah dari konflik bersenjata tiada henti yang terjadi di kawasan Palestina, khususnya Jalur Gaza. Sejarah peperangan ini merupakan bentuk kompleksitas kepentingan pihak-pihak di berbagai belahan dunia, yang mengakibatkan penderitaan di kalangan warga sipil. Kronologi peperangan disebutkan berikut:

Tahun	Peristiwa
1945	End of Second World War.
1946	Lebanon achieves full independence from France.
1947	(November) UN adopts Partition Plan for Palestine.
1948	(May) The outbreak of the first Arab–Israeli war and birth of the Palestinian refugee issue.
1950	Jordan annexes the West Bank.
1952	Free Officer Coup in Egypt. Gamal Abdel Nasser becomes President in 1954.
1956	Egypt.
1957	(January) Eisenhower Doctrine issued by US government.
1958	US marines land in Beirut at request of President Chamoun following widespread disorder.
1963	(March) Ba'ath Party to power in Syria following coup d'état.
1964	The Palestine Liberation Organization founded by Egypt.
1967	(June) Six Day War. Arab armies defeated, Israel occupies Palestinian, Syrian and Egyptian territory.
1968	(January) Fatah, the Palestinian resistance movement led by Yasser Arafat formed.
	(July) Ba'ath Party coup in Iraq.
1970	(September) President Nasser dies and Anwar Sadat becomes president.
	(September) Civil war in Jordan as Palestinian resistance forces and Jordanian armed forces clash.
	(November) Hafez al-Assad becomes President of Syria.
1973	defeats the Arab armies once more.
	platform.
2000	collapses.
	(June) Hafez al-Assad of Syria dies. His son Bashar elected Presidential successor.
	Jerusalem Palestinian protest and Israeli violence leads to a subsequent Israeli declaration of 'time
	(October) Al-Qaeda attack on USS Cole moored in Yemeni waters.
2001	(September) al-Qaeda, led by Usama Bin Laden, launch attacks on New York and Washington.
	(October) Allied alliance begins military operations against Afghanistan.
	(November) Kabul falls.
	(December) New interim administration led by Hamid Karzai takes power.
2002	'enemy of the state'.
	conflict.
	(November) UNSCR 1441 passed against Iraq and weapons of mass destruction.
2003	(March) War against Iraq launched by Allied forces led by the United States of America.
	published by the Quartet (the US, UN, EU and Russia) and handed over to the Palestinians and the

Urutan peristiwa diatas diharapkan mampu membantu untuk memahami betapa pentingnya upaya perdamaian di kawasan ini mengingat sekian lamanya konflik bersenjata ini tidak kunjung mendapat penyelesaian tuntas dan memakan korban warga sipil yang sangat banyak. Kejahatan terhadap kemanusiaan, politik

Apartheid, serta genosida tampak jelas dalam kasus-kasus yang muncul dalam publikasi lembaga-lembaga kemanusiaan yang berada langsung di wilayah tersebut. Seputar genosida, terdapat sebuah gambaran besar mengenai keterkaitan politik dunia dengan genosida. Hal yang sama dijelaskan dalam peta studi mengenai genosida dan peran terkait politik dunia berikut.

Gambar 2. Genosida dan Kekerasan Politik Sejak 1955



Sumber : Peace and Conflict 2005

These were the words with which, on 14 May 1948, David Ben Gurion, leader of the Zionist movement, announced to the world the birth of the state of Israel. He affirmed the new state's claim to legitimacy: that of the Jewish people's right, according to biblical promises made by Jehovah to Abraham. By May 1948 Israel was established as an independent state and was recognized by the UN.

46

⁴⁵Peace and Conflict 2005. A Global Survey of Armed Conflicts, Self-Determination Movements, and Democracy. Monty G. Marshall & Ted Robert Gurr with contributions by Victor Asal, Barbara Harff, Deepa Khosla, and Amy Pate P.57

⁴⁶ Pada 14 Mei 1948, David Ben Gurion, pimpinan gerakan Zionis, mengumumkan lahirnya negara Israel. Dia menegaskan legitimasi negara baru tersebut : bahwa hal tersebut merupakan hak para Yahudi, berdasarkan janji kitab yang dibuat oleh Jehovah kepada Ibrahim. Pada bulan tersebut, Israel berdiri sebagai

Hal diatas menggambarkan secara singkat terbentuknya negara Israel, yang baru berdiri pada tahun 1948 yang merupakan gambaran awal konflik terbuka Palestina – Israel. Kebijakan tersebut didukung oleh berbagai pihak, terkait pertimbangan politis yang ada saat itu. Berikut pernyataan yang sedikit mampu menjelaskan kondisi Eropa saat itu, yang turut berperan besar dalam peristiwa bersejarah tersebut.

*In the Gulf crisis, West Europeans gave up all pretense at a unified and independent European foreign policy. In particular, the relatively constructive and progressive European policy towards, and good will in, the Middle East was sacrificed. European intervention in favour of a more reasonable settlement of the Palestine -Israel issue receded beyond the horizon.*⁴⁷

Isu Palestina kian memanas, terutama pasca serangan 11 September di Amerika Serikat. Perang melawan terror dilancarkan di seluruh dunia, sehingga pendudukan Israel yang mendapat dukungan dari Amerika Serikat kian kuat karena segala kebijakan yang diambil dianggap sah dengan alasan memberantas HAMAS yang dipandang oleh Israel dan sekutunya sebagai kelompok teroris yang harus dilumpuhkan dengan berbagai cara, meski dengan mengorbankan warga sipil.

In the wake of the September attacks on the United States, China has launched its own "war on terror." Beijing now labels as terrorists those who are fighting for an independent state in the northwestern province of Xinjiang, which the separatists call "Eastern Turkestan." The government considers these activists part of a network of international Islamic terror, with finding from the

negara independen yang diakui oleh PBB). Conflicts in the Middle East since 1945 Second Edition Beverley Milton-Edwards and Peter Hinchcliffe Second edition first published 2004 by Routledge 11 New Fetter Lane, London. P.25

⁴⁷ Dalam krisis Teluk, warga Eropa Barat telah menyerah dengan kehadiran persatuan dan kebijakan independen warga Eropa. Khususnya, konstruksi relative dan kebijakan progresif Eropa kedepan, dan tujuan baik didalamnya dimana Timur Tengah telah dikorbankan. Intervensi Eropa dalam hal ini lebih merupakan pendudukan beralasan dari isu Palestina- Israel yang surut melewati wawasan seseorang. Third World War: A Political Economy of the Gulf War and the New World Order Andre Gunder Frank. *Third World Quarterly*, Vol. 13, No. 2. (1992), pp. 267-282. StableURL: <http://links.jstor.org/sici?sici=0143-6597%281992%2913%3A2%3C267%3ATWVAPE%3E2.0.CO%3B2-V> P.280

*Middle East, training in Pakistan, and combat experience in Chechnya and Afghanistan.*⁴⁸

Dalam pernyataan diatas, tampak jelas definisi mengenai terorisme dapat dibuat dengan mudah oleh negara. Sehingga pihak-pihak yang bertentangan dengan kepentingan pihak dominan, dapat digolongkan sebagai tindakan terror.

*The coincidence between the evolving changes of globalization, the inherent weaknesses of the Arab region, and the inadequate American response to both ensures that terrorism will continue to be the most serious threat to U.S. and Western interests in the twenty-first century. There has been little creative thinking, however, about how to confront the growing terrorist backlash that has been unleashed. Terrorism is a complicated, eclectic phenomenon, requiring a sophisticated strategy oriented toward influencing its means and ends over the long term. The current wave of international terrorism, characterized by unpredictable and unprecedented threats from nonstate actors, not only is a reaction to globalization but is facilitated by it*⁴⁹

Keberadaan globalisasi sangat lekat dengan perkembangan isu konflik di Timur Tengah. Perubahan-perubahan yang terjadi berdampak pada upaya-upaya perdamaian di Palestina khususnya Jalur Gaza. Lemahnya negara-negara Arab dalam fungsi diplomasi perundingan serta isu terorisme yang digambarkan terhadap kekuatan dominan yang dipilih rakyat Palestina

⁴⁸ Dalam kebangkitan serangan September di Amerika Serikat, Cina telah meluncurkan 'perang melawan teror'nya sendiri. Beijing saat ini melabel seseorang yang berjuang untuk kemerdekaan provinsi barat laut Xinjiang sebagai teroris, dimana kawasan separatis tersebut dikenal dengan "Turkestan Barat". Pemerintah memandang aktivis ini sebagai bagian dalam terror Islam internasional, yang bermula di Timur Tengah, dilatih di Pakistan, dan diberantas di Chechnya dan Afghanistan. Sumber: China's "War on Terror": September 11 and Uighur Separatism Author(s): Chien-peng Chung Source: Foreign Affairs, Vol. 81, No. 4 (Jul. - Aug., 2002), pp. 8-12 Published by: Council on Foreign Relations Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/20033235> Accessed: 03/11/2009 01:29 P.8

⁴⁹Terjemahan bebas: Merupakan sebuah kebetulan diantara perubahan perkembangan globalisasi, kelemahan yang melekat di kawasan Arab serta ketidakmampuan Amerika dalam memastikan terror tidak akan berlanjut, dimana hal ini menjadi ancaman serius bagi kepentingan Amerika Serikat dan Barat pada abad ke 21. Selama ini telah ada sedikit pemikiran kreatif, bagaimanapun, untuk melawan tumbuhnya pukulan teroris yang selama ini dilepaskan. Terorisme merupakan sesuatu yang rumit, terdiri dari berbagai fenomena, membutuhkan orientasi strategi rumit dalam menghadapi pengaruh alat itu sendiri, dikarakterisasi oleh ancaman tidak terduga dan tidak terjadi sebelumnya dari actor non-negara, bukan hanya sebagai reaksi atas globalisasi namun juga difasilitasi oleh hal itu sendiri. Source: Behind the Curve: Globalization and International Terrorism Author(s): Audrey Kurth Cronin Source: International Security, Vol. 27, No. 3 (Winter, 2002-2003), pp. 30-58 Published by: The MIT Press Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3092113> Accessed: 03/11/2009 01:47

berdasarkan pemilu terakhir negara tersebut merupakan gambaran fenomena konflik yang terus berlangsung di kawasan tersebut. Isu terorisme oleh HAMAS dipergunakan Israel untuk membatasi akses barang-barang kebutuhan pokok, obat-obatan, listrik, serta alat-alat pendidikan bagi warga Jalur Gaza. Definisi teror dipergunakan untuk melumpuhkan ekonomi warga Palestina.

The terms terror, terrorism, and terrorist do not identify causally coherent and distinct social phenomena but strategies that recur across a wide variety of actors and political situations. Social scientists who redefine the terms confuse themselves and render a disservice to public discussion. The U.S. government's own catalogs of terrorist events actually support both claims. Some vivid terms serve political and normative ends admirably despite hindering description and explanation of the social phenomena at which they point. Those double-edged terms include riot, injustice, and civil society, all of them politically powerful but analytically elusive (Moore 1979; Vermunt and Steensma 1991; Cohen and Arato 1992; Brass 1996; Herzog 1998; Plotz 2000; Schweingruber 2000; Edwards, Foley, and Diani 2001; Ferree et al. 2002). They also include terror, terrorism, and terrorists.⁵⁰

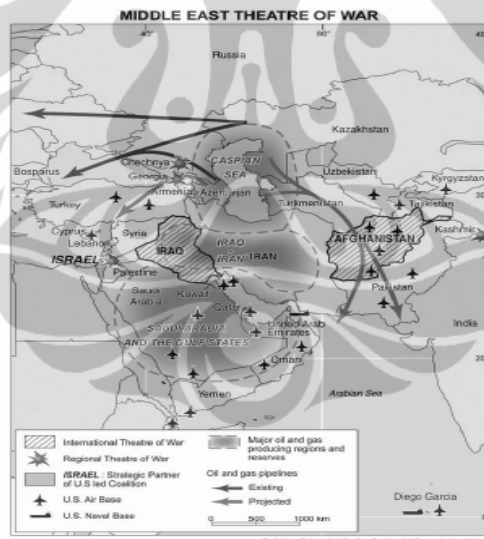
Definisi teror dan terorisme dengan mudahnya dibuat oleh pihak dominan sehingga menjadi senjata untuk menghambat pergerakan pihak-pihak yang menentang. Gerakan FG dalam beberapa media disebutkan sebagai gerakan pro teroris, karena mereka turut bekerjasama dengan organisasi HAMAS yang dinilai menggunakan kekerasan dalam melawan pendudukan Israel.

⁵⁰ Terjemahan Bebas :Istilah terror, terorisme, dan teroris tidak mengidentifikasi keterkaitan kausal dan membedakan fenomena sosial, namun strategi yang berulang menyebarangi sebuah varietas yang luas dari actor dan situasi politik. Ilmuwan sosial yang mendefinisikan istilah tersebut membingungkan mereka sendiri dan menyumbang sebuah perbuatan merugikan bagi diskusi public. Pemerintah Amerika Serikat sendiri dalam katalognya mendukung kedua hal tersebut. Beberapa istilah hidup secara mengagumkan dan melayani tujuan normatif dan politik meskipun mengganggu deskripsi seputar fenomena sosial yang mereka bahas. Dua tepi istilah-istilah tersebut meliputi kerusuhan, ketidakadilan, masyarakat sipil, dimana mereka semua secara politis memiliki kekuatan namun sukar dipahami secara analitis. Source: Terror, Terrorism, Terrorists Author(s): Charles Tilly Source: Sociological Theory, Vol. 22, No. 1, Theories of Terrorism: A Symposium (Mar., 2004), pp. 5-13 Published by: American Sociological Association Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3648955> Accessed: 03/11/2009 01:25

While the problem of war in general deserves continuing scholarly attention, it seems appropriate to single out the systemwide—that is, global-war for intensive analysis as the kind of war that poses the gravest threat of catastrophe. Such a war can best be understood as an integral part of a long cycle, a recurring pattern in the development and operation of the global layer of the international system. From this perspective the design of a solution to the problem of global war requires either disruption of the long cycle or the development of a functional substitute for the leadership selection process that these wars have provided for the global system.⁵¹

Sistem peperangan global tersebut senantiasa terpelihara dari waktu ke waktu, sehingga peta perang wilayah Timur Tengah dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 3. Lokasi Peperangan Timur Tengah



Sumber: ICRC

⁵¹ Permasalahan seputar perang yang secara umum layak mendapatkan perhatian para sarjana lebih lanjut, dimana merupakan hal yang sesuai untuk memisahkan apa yang disebut 'sistem yang luas', dimana perang global dalam analisis intensif merupakan jenis perang yang memiliki ancaman paling mengerikan dalam bencana alam. Perang tersebut dapat dimengerti sebagai bagian integral dari siklus yang panjang, sebuah pola berulang dalam perkembangan dan pelaksanaan dari lapisan global dalam system internasional. Dari perspektif ini, rancangan solusi permasalahan perang global membutuhkan gangguan dalam siklus yang panjang tersebut ataupun pengembangan sebuah pengganti fungsional bagi proses seleksi kepemimpinan dimana perang tersebut telah disediakan oleh system global

Understanding Global War Author(s): George Modelski and Patrick M. Morgan Source: The Journal of Conflict Resolution, Vol. 29, No. 3 (Sep., 1985), pp. 391-417 Published by: Sage Publications, Inc. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/173943> Accessed: 03/11/2009 01:36

Peperangan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia terutama warga sipil terus terjadi, meski telah terdapat perangkat-perangkat hukum internasional yang telah mengatur peperangan bersenjata tersebut. Salah satu perangkat penting yang tidak menunjukkan fungsi melindungi warga sipil adalah Konvensi Jenewa.

The Geneva Conventions have been completed or are supplemented by a series of other important international treaties.

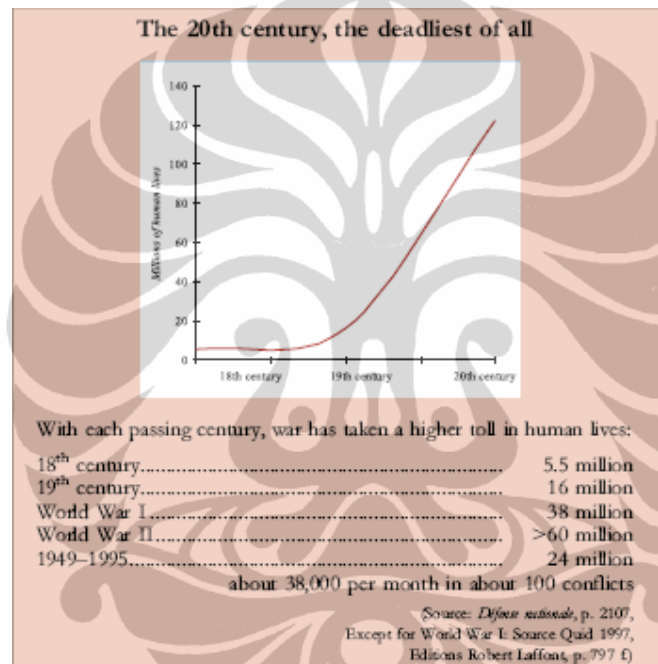
The Advisory Service's activities focus on promoting universal acceptance of these treaties, whose status of ratification or adherence is as follows:

Year	Event
1949	Geneva Conventions for the Protection of War Victims – 194 States Parties – and their three Additional Protocols – Protocol I 167 States Parties, Protocol II 153 States Parties and Protocol III 8 States Parties.
1954	Cultural Property Convention – 116 States Parties – and its two Protocols, of 1954 – 83 States Parties – and 1999 – 44 States Parties – respectively.
1972	Biological Weapons Convention – 155 States Parties – and the 1925 Geneva Protocol – 134 States Parties.
1976	Environmental Modification Techniques Convention – 72 States Parties.
1980	Conventional Weapons Convention – 102 States Parties – and its five Protocols – Protocol I 100 States Parties, Protocol II 89 States Parties, Protocol III 85 States Parties, Protocol IV 84 States Parties and Protocol V 30 States Parties, including its Amendment.
1989	Convention on the Rights of the Child – 193 States Parties – and the Child Soldier Protocol – 114 States Parties.
1993	Chemical Weapons Convention – 102 States Parties.
1997	Anti-personnel Landmines Convention – 152 States Parties.

1998 International Criminal Court Statute – 105 States Parties
52

Ketentuan-ketentuan tersebut hanya seperangkat peraturan, karena meski temuan pelanggaran HAM telah diajukan ke muka sidang PBB, tindak lanjut atas temuan tersebut tidak mampu diimplementasikan sehingga tampak dibutuhkan evaluasi dalam kinerja perangkat hukum internasional tersebut. Berikut merupakan jumlah korban perang yang tewas dihitung berdasarkan abad.

Gambar 4. Jumlah Korban Perang.



Sumber : ICRC

Perang merupakan kondisi yang memakan korban manusia – yang umumnya adalah warga sipil yang tidak berdosa. Data yang dikumpulkan oleh ICRC diatas memperlihatkan peperangan dari abad 18 hingga abad ke 21 yang memperlihatkan betapa besarnya konflik peperangan memakan korban manusia. Kepentingan-kepentingan elite politik mengorbankan keselamatan jiwa warga sipil, sehingga

⁵²Report of the Second Universal Meeting of National Committees on International Humanitarian Law. Geneva, 19–21 March 2007. ICRC, September 2007 Switzerland P.46-47

⁵³Handbook Respect for International Humanitarian Law. Christine Pintat , Kareen Jabre,Mr. Arnold Luethold, . Fre'de'ric Me'gret and Mr. Laurent Masmjean. ICRC. Switzerland. P.9

tampak jelas bahwa konflik bersenjata yang saat ini ada di kawasan Palestina harus mendapatkan penanganan yang seharusnya dari pihak-pihak yang terkait.

2.2.2. Studi Seputar Palestina

Prabhat Patnaik (2002) mengemukakan bahwa, *“When the Palestinian people are being massacred in their hundreds by an Israel supported by imperialism, the pretence of spreading human values should be seen for what it is.”*⁵⁴ Adel Samara (2000) membahas mengenai kondisi ekonomi wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza yang didominasi kebijakan ekonomi Israel dan disubordinasi oleh lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan IMF.⁵⁵ Lisa Hajjar (2001) mengangkat pengembangan dan transformasi gerakan hak asasi manusia (HAM) di Israel/Palestina dengan memfokuskan pada perjuangan hak asasi di wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza yang mengalami situasi praktek pelanggaran HAM sejak didirikannya Pemerintah Otoritas Palestina (PA) pada tahun 1994.⁵⁶

The early part of the 1990s saw considerable euphoric hope amongst mainstream Israelis and Palestinians for an arrangement that would bring the conflict to an end. While much of this was obviously linked to the spirit of reconciliation that was apparent in the 1993 Oslo accord, the latter part of the decade exposed some fundamental structural flaws in the negotiating process that emerged following that accord. The Oslo-Wye process constructs the relations between Israel and Palestine as taking place between two fully fledged national movements, inscribed or soon to be inscribed in two separate nation states. Immanuel Wallerstein's

⁵⁴ Globalization and the Emerging Global Politics Author(s): Prabhat Patnaik Source: Social Scientist, Vol. 30, No. 11/12 (Nov. - Dec., 2002), pp. 3-16 Published by: Social Scientist Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3518197> Accessed: 26/10/2009 00:11

⁵⁵ Globalization, the Palestinian Economy, and the "Peace Process" Author(s): Adel Samara Source: Journal of Palestine Studies, Vol. 29, No. 2 (Winter, 2000), pp. 20-34 Published by: University of California Press on behalf of the Institute for Palestine Studies Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2676534> Accessed: 26/10/2009 00:15

⁵⁶ Human Rights in Israel/Palestine: The History and Politics of a Movement Author(s): Lisa Hajjar Source: Journal of Palestine Studies, Vol. 30, No. 4 (Summer, 2001), pp. 21-38 Published by: University of California Press on behalf of the Institute for Palestine Studies Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2676613> Accessed: 26/10/2009 00:17

*analysis of the development during the six-teenth century of a European world system.*⁵⁷

Gaza merupakan kota terbesar di Palestina yang berada dibawah pemerintahan pendudukan.⁵⁸ Distrik Gaza terletak di pantai selatan Palestina. Dibawah rencana pemisahan pada tahun 1947, distrik ini merupakan bagian dari negara Palestina Arab. Namun selama perang pada tahun 1948, pihak Mesir mengambil alih kontrol terhadap kota Gaza serta beberapa kota disekitarnya yang kemudian saat ini dikenal sebagai Jalur Gaza⁵⁹ Pada pertengahan November 2000, Israel melakukan penutupan selama 50 hari terhadap Jalur Gaza dengan cara menolak seluruh warga Palestina maupun barang yang berasal dari wilayah tersebut untuk masuk ke wilayah Israel maupun keluar dari wilayah pendudukan (occupied territories). Diperkirakan penutupan tersebut telah menyebabkan kerugian total \$336 juta terhadap kondisi perekonomian Palestina. Hal ini belum termasuk perhitungan kerugian fisik infrastruktur maupun kehidupan manusia didalamnya sehingga menyebabkan kerugian yang sangat besar. Penutupan ini dilakukan Israel setelah aksi Intifada yang terjadi pada bulan September 2000.⁶⁰

Sejumlah penelitian seputar kontroversi keberadaan Palestina telah dilakukan. Pembahasan yang dilakukan selama ini meliputi faksi-faksi politik

⁵⁷Pada awal tahun 1990-an terlihat euphoria harapan di kalangan warga Israel dan Palestina untuk berakhirnya konflik. Hal ini jelas terkait dengan semangat rekonsiliasi yang muncul pada perjanjian Oslo tahun 1993, dimana pada akhir decade terlihat beberapa kecacatan struktural yang fundamental. Peta proses Oslo mengkonstruksikan hubungan Israel – Palestina sebagai dua gerakan nasional yang berdiri sepenuhnya, yang dikesankan keduanya akan menjadi dua negara yang berbeda. Analisis Immanuel Wallerstein yang berkembang selama abak keenam belas mengenai system dunia Eropa, dengan pembagian baru buruh dikalangan negara inti, koloni sekitar, dan kawasan-kawasan transisi, merupakan sebuah historisasi dari model Marxist, yang menunjukkan bahwa dalam periode tertentu, sebuah rangkaian politik dan ekonomi bergabung untuk mendefinisikan kembali era dan bagian-bagian penting di belahan bumi. Tesis ini kemudian menginformasikan historisasi kritis alam periode lain, termasuk ekonomi politik dalam kapitalisme yang muncul kemudian Postnational Palestine/Israel? Globalization, Diaspora, Transnationalism, and the Israeli-Palestinian Conflict Author(s): Dan Rabinowitz Source: Critical Inquiry, Vol. 26, No. 4 (Summer, 2000), pp. 757-772 Published by: The University of Chicago Press Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/1344329> Accessed: 26/10/2009 00:20

⁵⁸ The 100 Year War: Report from the West Bank and Gaza Author(s): Joan Mandell and Salim Tamari Source: MERIP Reports, No. 108/109, The Lebanon War (Sep. - Oct., 1982), pp. 42-44+57 Published by: Middle East Research and Information Project Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3012242> Accessed: 22/02/2009 22:31

⁵⁹ The 1956-57 Occupation of the Gaza Strip: Israeli Proposals to Resettle the Palestinian Refugees Author(s): Nur Masalha Source: British Journal of Middle Eastern Studies, Vol. 23, No. 1 (May, 1996), pp. 55-68 Published by: Taylor & Francis, Ltd. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/195819> Accessed: 22/02/2009 22:58

⁶⁰ Under Siege: Closure, Separation and the Palestinian Economy Author(s): Leila Farsakh Source: Middle East Report, No. 217, Beyond Oslo: The New Uprising (Winter, 2000), pp. 22-25 Published by: Middle East Research and Information Project Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/1520169> Accessed: 22/02/2009 23:10

dalam negeri Palestina serta perjanjian internasional yang melibatkan pihak-pihak lain yang turut terlibat dalam peperangan tersebut⁶¹, peran PBB melalui UNWRA dalam membantu korban perang tahun 1948⁶², perubahan sosial dan politik dalam situasi Intifada seiring kegagalan proses perdamaian yang dilakukan berbagai pihak⁶³. Selain itu terdapat pula kajian seputar Tepi Barat dan Jalur Gaza mengenai perubahan sosial, politik dan ekonomi terkait kegagalan perjanjian Oslo pada 1993⁶⁴ serta sikap warga Palestina dan warga Israel dalam upaya perdamaian pada masa tersebut terkait dengan kebijakan luar negeri dan sikap pimpinan politik di kedua wilayah tersebut.⁶⁵ Terdapat pula pembahasan mengenai kegiatan multilateral, regional dan kegiatan-kegiatan internasional dalam mengupayakan proses perdamaian.⁶⁶ Studi akademis yang ada terkait isu Jalur Gaza adalah keberadaan kelompok Islam Hamas yang memiliki akar yang kuat di wilayah tersebut.⁶⁷

Pendudukan selama 20 tahun Israel di Jalur Gaza telah mengatur seluruh kegiatan harian warga yang tinggal di wilayah tersebut. Berpergian merupakan sesuatu yang dibatasi, izin membangun ditolak maupun ditunda pemberiannya

⁶¹ The Threat to the Palestinian Movement Source: *Journal of Palestine Studies*, Vol. 13, No. 2 (Winter, 1984), pp. 158-164 Published by: University of California Press on behalf of the Institute for Palestine Studies Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2536908> Accessed: 22/02/2009 22:38

⁶² Between Occupier and Occupied: UNRWA in the West Bank and the Gaza Strip Author(s): Benjamin N. Schiff Source: *Journal of Palestine Studies*, Vol. 18, No. 3 (Spring, 1989), pp. 60-75 Published by: University of California Press on behalf of the Institute for Palestine Studies Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2537342> Accessed: 22/02/2009 23:03

⁶³ The Political Economy of Despair: Changing Political and Economic Realities in the Gaza Strip Author(s): Sara Roy Source: *Journal of Palestine Studies*, Vol. 20, No. 3 (Spring, 1991), pp. 58-69 Published by: University of California Press on behalf of the Institute for Palestine Studies Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2537546> Accessed: 22/02/2009 22:59

⁶⁴ Palestinian Society and Economy: The Continued Denial of Possibility Author(s): Sara Roy Source: *Journal of Palestine Studies*, Vol. 30, No. 4 (Summer, 2001), pp. 5-20 Published by: University of California Press on behalf of the Institute for Palestine Studies Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2676612> Accessed: 22/02/2009 22:38

⁶⁵ The Political Economy of Attitudes toward Peace among Palestinians and Israelis Author(s): Jodi Nachtwey and Mark Tessler Source: *The Journal of Conflict Resolution*, Vol. 46, No. 2 (Apr., 2002), pp. 260-285 Published by: Sage Publications, Inc. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3176175> Accessed: 22/02/2009 22:49

⁶⁶ Quarterly Update on Conflict and Diplomacy: 16 February-15 May 2004 Author(s): Michele K. Esposito Source: *Journal of Palestine Studies*, Vol. 33, No. 4 (Summer, 2004), pp. 139-165 Published by: University of California Press on behalf of the Institute for Palestine Studies Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3247567> Accessed: 22/02/2009 23:10

⁶⁷ Review: [untitled] Author(s): Douglas Little Reviewed work(s): *Militant Islam Reaches America* by Daniel Pipes *Face to Face with Political Islam* by François Burgat Source: *International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-)*, Vol. 79, No. 4 (Jul., 2003), pp. 883-884 Published by: Blackwell Publishing on behalf of the Royal Institute of International Affairs Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3569582> Accessed: 22/02/2009 23:12

serta pembiayaan pelayanan sosial selama ini telah dipotong. Barang-barang yang dihasilkan tidak dapat dengan mudah dipasarkan di Israel dan segala aspek dalam pemerintahan lokal diatur oleh pemerintah militer.⁶⁸ Selain itu, terdapat pula kajian mengenai kekuatan masyarakat sipil di Palestina, Israel maupun dunia dalam mempengaruhi kebijakan maupun dukungan publik terkait pendudukan tersebut.⁶⁹ Peran *United Nations Emergency Force* di Jalur Gaza⁷⁰, pelanggaran Piagam PBB serta komponen-komponen yang termuat dalam *The Universal Declaration of Human Rights* selama pendudukan terjadi⁷¹ merupakan kajian-kajian yang telah dilakukan dalam isu seputar pendudukan militer Israel di Palestina khususnya Jalur Gaza sebagai wilayah yang paling sering terkena konflik. Penggusuran rumah dan perusakan lahan-lahan pertanian warga Palestina.⁷²

2.2.3. Perkembangan Seputar *Free Gaza Movement*

Aktivitas *Free Gaza Movement* terus berkembang sejak awal kemunculannya di pertengahan tahun 2009. Jaringan yang kuat, menyebabkan gerakan ini terus berkembang dalam bentuk-bentuk yang lebih luas dalam mengembangkan kesadaran warga dunia terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berlangsung di Jalur Gaza. Berikut perkembangan terbaru dari Gaza Freedom March yang akan diselenggarakan bulan Desember 2009 ini, dengan melakukan aksi konvoi menuju Gaza. Berikut merupakan pernyataan dari aktivis penyelenggara aksi di kawasan New York:

⁶⁸ The West Bank and Gaza: Twenty Years Later Author(s): Emile A. Nakhleh Source: Middle East Journal, Vol. 42, No. 2 (Spring, 1988), pp. 209-226 Published by: Middle East Institute Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/4327734> Accessed: 22/02/2009 22:53

⁶⁹ Paralysis over Palestine: Questions of Strategy Author(s): Jeff Halper Source: Journal of Palestine Studies, Vol. 34, No. 2 (Winter, 2005), pp. 55-69 Published by: University of California Press on behalf of the Institute for Palestine Studies Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/4486739> Accessed: 22/02/2009 23:56

⁷⁰ The U. N. Experience in Gaza Author(s): Hamilton Fish Armstrong Source: Foreign Affairs, Vol. 35, No. 4 (Jul., 1957), pp. 600-619 Published by: Council on Foreign Relations Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/20031256> Accessed: 22/02/2009 22:18

⁷¹ United Nations Competence in the West Bank and Gaza Strip Author(s): Mahnoush H. Arsanjani Source: The International and Comparative Law Quarterly, Vol. 31, No. 3 (Jul., 1982), pp. 426- 450 Published by: Cambridge University Press on behalf of the British Institute of International and Comparative Law Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/759000> Accessed: 22/02/2009 22:51

⁷² Under the Guise of Security: House Demolitions in Gaza Author(s): Chris Smith Source: Middle East Report, No. 220 (Autumn, 2001), pp. 4-5 Published by: Middle East Research and Information Project Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/1559402> Accessed: 22/02/2009 22:52

Many delegates are already in Cairo and more are arriving daily. Delegates cancelled holiday plans months ago to come on the Gaza Freedom march and air tickets were purchased. We anticipate that virtually all of the 1,360 delegates will come to Cairo. Because of the incredible humanitarian crisis in Gaza caused by the Israeli attack on Gaza a year ago and by the international siege on Gaza, we feel morally obligated to continue our mission to bring more international attention to the plight of the 1.5 million people imprisoned in Gaza.⁷³ The Egyptian foreign ministry said the march could not be allowed because of the “sensitive situation” in Gaza. Over 1,000 activists from 42 countries had signed-up to join “the Gaza freedom march” planned for next week.⁷⁴

Selain menyelenggarakan aksi konvoy menuju Gaza, Gaza Freedom March juga dilakukan dalam bentuk aksi demonstrasi solidaritas bagi para pendukung di seluruh duni yang tidak dapat hadir dalam konvoi yang dimulai dari Kairo tersebut. Aksi tersebut berlangsung di berbagai belahan dunia, terutama wilayah Amerika Utara dan Eropa, yang merupakan basis kuat massa Gerakan FG.

2.2.4. Gerakan Sosial dan *Peacemaking Criminology*

Peacemaking Criminonology dalam kemunculannya merupakan sebuah teori tentang perdamaian, sebagaimana yang dikemukakan Hal Pepinsky sebagaimana berikut,

⁷³ Banyak delegasi sudah berada di Kairo dan akan lebih banyak lagi yang akan datang dalam hitungan hari. Para delegasi tersebut menundarencana liburan sebulan yang lalu untuk datang ke Gerak Jalan Gaza dan telah membeli tiket pesawat. Kami mengantisipasi 1,360 orang delegasi yang benar-benar akan datang ke Kairo. Karena krisis kemanusiaan yang luar biasa di Gaza yang disebabkan oleh serangan Israel serta pengepungan internasional atas Gaza, maka kami bertanggung jawab secara moral untuk melanjutkan misi kami untuk menarik perhatian internasional akan situasi menyedihkan 1.5 orang yang terpenjara di Gaza. Kementrian Luar Negeri Mesir menyatakan gerak jalan tersebut tidak diperbolehkan karena “situasi yang sensitive” di Gaza. Lebih dari 1000 aktivis dari 42 negara telah mendaftar untuk bergabung dalam “Gerak Jalan Gaza” yang direncanakan akan diselenggarakan pekan depan. Sumber : Gaza Freedom March is determined to break the siege 1,360 International Delegates appeal to Egypt to let the March proceed December 21st, 2009. Retrieved from <http://www.gazafreedommarch.org/article.php?id=5240>. Juga lihat Gaza Freedom March UPDATE December 21, 2009. Retrieved from <http://aliabunimah.posterous.com/urgent-gaza-freedom-march-update-call-for-sup>

⁷⁴ Egypt bans a protest march into Gaza. Retrieved from 21 December 2009 http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8425232.stm

“I began my explicit inquiry into peacemaking by stating a theory that peace supplanted violence whenever interaction became “responsive” (Pepinsky 1988; expanded in Pepinsky 1991). While violence and the fear and pain it engenders came from people pursuing their own independent agendas and objectives regardless of how others were affected, responsiveness was interaction in which actors’ personal agendas shifted constantly to accommodate others’ feelings and needs. (Pepinsky and Jesilow 1992 [1984]: 127-38).”⁷⁵

Dukungan atas tindakan-tindakan tanpa kekerasan serta refleksi mengenai mekanisme non kekerasan berubah. Metode tanpa kekerasan yang tersedia untuk digunakan oleh kekuatan oposisi melawan pesaingnya semakin meluas dan bervariasi. Pemikiran kreatif dibutuhkan dalam mendorong kemunculan metode tertentu dalam kondisi khusus yang ada terkait kondisi spesifik. Berikut merupakan kutipan referensi mengenai gerakan sosial yang menggunakan cara non kekerasan :

“Nonviolent actions against an oppressive regime will frequently be met with violent retaliation. Beatings, torture, imprisonment, and other sanctions (violent, economic, and social) must be expected. When the government reacts in such a manner, however, wide publicity given to such acts can often be used by the opposition to strengthen public support for the democracy movement and to weaken the regime by exposing its brutality and by raising questions about its legitimacy. In movements over the past century, arrest and imprisonment were marks of honor”.⁷⁶

⁷⁵ Saya memulai penelitian eksplisit mengenai peacemaking dengan menyatakan sebuah teori bahwa perdamaian digantikan oleh kekerasan ketika interaksi menjadi ‘responsif’. Ketikak kekerasan serta ketakutan dan luka dalam ditimbulkan oleh orang yang meraih agenda independen dan tujuan mereka mengenai bagaimana seseorang dipengaruhi, ke-responsif-an adalah interaksi dimana agenda personal actor bergeser secara konstan untuk mengakomodasi perasaan dan kebutuhan pihak lainnya. (Pepinsky and Jesilow 1992 [1984]: 127-38). Sumber : A CRIMINOLOGIST’S QUEST FOR PEACE

Hal Pepinsky. Chapter 1

⁷⁶ Terjemahan bebas : Tindakan non kekerasan melawan rezim yang menindas kerap kali menemui pembalasan kekerasan. Pemukulan, penyiksaan, pemenjaraan dan sanksi-sanksi lain (kekerasan, ekonomi dan social) menjadi sesuatu yang diharapkan. Ketika pemerintah memberikan reaksi tertentu, bagaimanapun, publisitas yang luas akan tindakan tersebut seringkali digunakan pihak oposisi untuk memperkuat dukungan public bagi gerakan demokrasi dan untuk memperlemah rezim dengan menunjukkan kepada masyarakat luas akan brutalitas dan dengan memunculkan pertanyaan akan legitimasi rezim tersebut. Dalam pergerakan

Oleh karena itu, penting untuk menganalisis fenomena gerakan sosial yang berupaya untuk mencari cara alternatif dalam memberi solusi dalam kondisi penindasan yang ada. *Peacemaking Criminology* yang berupaya untuk member jalan keluar bagi kejahatan yang ada di muka bumi, dalam penelitian ini akan digunakan dalam menjelaskan fenomena komunitas *Free Gaza Movement* sebagai gerakan sosial yang menggerakkan masyarakat sipil global dalam menembus blokade Jalur Gaza dengan mengutamakan prinsip-prinsip non kekerasan

Gerakan sosial yang berlangsung di seluruh dunia terkait isu konflik Palestina dan Israel yang kian meluas pasca agresi Israel ke Jalur Gaza pada Desember 2008 merupakan bentuk-bentuk upaya perlawanan non kekerasan dari masyarakat sipil global atas pelanggaran besar-besarnya Israel atas hukum internasional yang merupakan bentuk jelas kejahatan terhadap kemanusiaan. Terkait dengan fenomena tersebut, *Peacemaking Criminology* dipandang mampu dalam menjelaskan kondisi yang sedang berlangsung di berbagai belahan dunia tersebut. Berikut merupakan definisi seputar *Peacemaking Criminology* yang digunakan oleh para kriminolog.

*Peacemaking criminology is a non-violent movement against oppression, social injustice and violence as found within criminology, criminal justice and Society in general. Richard Quinney proposes that crime and the criminal justice process are characterized by suffering to victims, offenders and society and that crime and justice problems may be eliminated or reduced by healing the suffering which makes them a possibility. A strategy of compassion and service is therefore advocated to affect suffering and thus crime. Peacemaking criminologists recognize the dialectical relationship between the individual and society, each shaping and being shaped by the other. It is therefore important that individuals achieve a measure of peace within themselves in order to move society in the direction of peace*⁷⁷

selama abad terakhir ini, penahanan dan pemenjaraan ditandai sebagai kehormatan. Sumber : On Strategic Nonviolent Conflict: Thinking About The Fundamentals. P.34

⁷⁷ *Peacemaking Criminology* merupakan gerakan non kekerasan melawan penindasan, ketidakadilan social dan kekerasan yang ditemukan dalam kriminologi, peradilan pidana dan masyarakat secara umum. Richard Quinney menyebutkan bahwa kejahatan dan proses

Peacemaking Criminology muncul sekitar 15 tahun yang lalu yang disinyalkan dalam publikasi Harold Pepinsky dan Richard Quinney dalam *Criminology as Peacemaking* (1991). Digambarkan dalam tiga tradisi Peacemaking (religius dan humanistik, feminis dan tradisi kritis), argument umum yang dikemukakan oleh Pepinsky dan Quinney bahwa seluruh sistem peradilan pidana di Amerika dikenal dengan kekerasan dan penindasan (sebagaimana yang terlihat dalam sistem penjara), perang (sebagaimana dilihat dalam “perang terhadap kejahatan” dan “perang terhadap obat-obatan terlarang”) serta kegagalan untuk memberikan kontribusi terhadap masalah kejahatan (sebagaimana kegagalan yang tampak dalam mengurangi kemiskinan di masyarakat). Quinney (1991:3), mengkritisi kriminologi yang ada selama ini:

“Mari kita mulai dengan sebuah realisasi fundamental. Tidak ada sejumlah pemikiran maupun kebijakan publik yang telah membawa kita lebih dekat dengan pemahaman maupun penyelesaian permasalahan kejahatan. Semakin kita bereaksi terhadap kejahatan, semakin kita menghilangkan diri kita pada setiap pemahaman dan setiap upaya mengurangi permasalahan.”

Pandangan kritis Quinney ini menggambarkan pentingnya penyelesaian fundamental dalam berbagai peristiwa-peristiwa kejahatan. Quinney melanjutkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, telah muncul berbagai upaya memformulasikan kembali hukum, menghukum pelaku dan mengkuantifikasi pengetahuan ini masih menyisakan sebuah *crime-ridden* utama negara. Disamping semua kesejahteraan, pengembangan ekonomi dan kecanggihan ilmu pengetahuan ilmiah, negara tempat Quinney berada merupakan salah satu negara dengan catatan kriminal terburuk di dunia. Secara utama, Peacemaking

peradilan pidana dikarakterisasi dengan penderitaan pada korban, pelaku, dan masyarakat serta kejahatan dan permasalahan keadilan dapat dihilangkan atau dikurangi dengan penyembuhan derita yang menyebabkannya. Sebuah strategi dengan kasih dan layanan advokasi akan dampak derita akan kejahatan. Pengusung Peacemaking Criminology mengenai hubungan dialektika antara individual dan masyarakat, yang saling membentuk satu dengan yang lainnya. Hal ini menjadi penting dimana para individu meraih ukuran damai dalam diri mereka sendiri untuk bergerak dalam masyarakat menuju perdamaian. .
Sumber : Gulati, Shruti Gola (1996). *Healing the Circle: Exploring the Conjunction of Peacemaking Criminology and Native Justice Initiatives* M.A. thesis, Department of Criminology, University of Ottawa. Retrieved March

4, 2010 on <http://www.restorativejustice.org/articlesdb/articles/5568>

Criminology menyatakan bahwa kejahatan terkait dengan penderitaan, sehingga untuk mengakhiri kejahatan maka penderitaan harus diakhiri. Hal ini bermakna bahwa kemiskinan, rasisme, seksisme, alienasi, perlakuan salah dalam keluarga, pelecehan dan segala bentuk penderitaan merupakan bagian reduksi akan kejahatan yang harus dilakukan. Sehingga, *Peacemaking Criminology* berpendapat bahwa negara sendiri turut berperan dalam terjadinya kejahatan (juga kekerasan) melalui kebijakan-kebijakan yang represif terhadap control sosial seperti hukuman mati, lamanya hukuman penjara bagi pelaku serta kriminalisasi kejahatan non-kekerasan seperti penyalahgunaan obat-obatan.

Peacemaking Criminology kemudian melakukan fokus pada pelaku individual yang selama ini diabaikan oleh pengaturan dalam institusi yang ada dalam masyarakat berkontribusi pada tingginya tingkat kejahatan yang ada, sehingga kriminologi sendiri harus menekankan kepedulian dalam mempromosikan keadilan sosial yang lebih besar antar kelas-kelas sosial. Akhirnya, *peacemaking criminology* menyatakan bahwa perubahan paling signifikan yang telah dibuat oleh system peradilan pidana adalah dengan bergerak dari peradilan pidana ke *restorative justice*. *Peacemaking Criminology* bukanlah arus utama dalam kriminologi. Kriminologi ini bukanlah jenis positivis yang berorientasi dan tidak terobsesi dengan analisis statistic mendalam atas penyebab perilaku jahat. Hal tersebut bukanlah menyatakan *peacemaking criminology* tidak tertarik pada penyebab kejahatan, namun pendekataan yang dilakukan lebih kepada isu etiologis dalam cara-cara non tradisional. Sebagai contoh, dalam memberikan kesimpulan mengenai *peacemaking criminology*, Quinney mencoba untuk menggambarkan mengenai kerangka isu etiologi :

- (1) Meskipun mode rasional di barat bersyarat, keterbatasan pengetahuan mengenai sesuatu telah diketahui.
- (2) Realita kebenaran adalah kekosongan: bahwa segala sesuatu yang nyata melewati konsepsi manusia,
- (3) Setiap kehidupan merupakan sebuah perjalanan spiritual menuju sesuatu yang tidak diketahui dan tidak dapat diketahui, melebihi egosentisi itu sendiri,

- (4) Keberadaan manusia dikarakterisasi oleh penderitaan; kejahatan adalah derita; dan sumber penderitaan berada didalam diri setiap kita.
- (5) Melalui cinta dan kasih, diluar egosentris sendiri, kita dapat mengakhiri derita dan hidup dalam damai, secara personal maupun kolektif.
- (6) Mengakhiri derita dapat diraih dalam sebuah proses keluar dari pikiran dan membuka hati, dan menjadi peduli.
- (7) Kejahatan dapat diakhiri dengan cara mengakhiri derita, yang ada hanya ketika ada perdamaian-melalui cinta dan kasih yang telah ditemukan dalam kepedulian
- (8) Pengertian, melayani, keadilan, semuanya mengalir secara alami dalam kasih dan sayang, dari perhatian penuh terhadap realitas saat ini,
- (9) Sebuah kriminologi *peacemaking*, kriminologi non kekerasan dengan kasih dan pelayanan, berusaha untuk mengakhiri penderitaan dan mengurangi kejahatan.

Kerangka etiologi seputar *Peacemaking Criminology* diatas mengajak kita untuk meninjau kembali makna kejahatan, dengan keluar dari pikiran dan membuka hati dengan semua fenomena yang ada sekeliling dan dapat dianalisis sesuai dengan karakter penyelesaian kejahatan. Model-model penyelesaian konvensional yang selama ini hanya menimbulkan derita bagi pihak-pihak yang berkonflik akibat insensitivitas pelaku sistem peradilan pidana membutuhkan tinjauan kembali untuk mencapai tujuannya dalam memberika keadilan bagi pelaku, korban maupun masyarakat yang terlibat. *Peacemaking Criminology* digunakan dalam tulisan ini agar dapat memberikan makna dalam penyelesaian konflik-konflik dalam skala besar, yakni kejahatan perang, dimana konsep kasih, pengertian, non kekerasan serta melayani perlu untuk diformulasikan dalam gerakan terstruktur dan dikoordinasikan dengan baik. Fenomema gerakan FG yang digolongkan penulis sebagai sebuah promosi perdamaian dalam konteks pembahasan ini, merupakan bentuk *Peacemaking Criminology* yang nyata dalam menjadi solusi alternatif sebuah kejahatan di level dunia, yakni kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Salah satu tantangan bentuk kriminologi ini adalah pengembangan pada teori koheren yang menyatukan. Secara umum, salah satu pemikiran tentang keriminologi adalah sebuah upaya untuk menjelaskan penyebab

kejahatan.). Teori *Differential Association* Edwin Sutherland (1947) dan Teori Kontrol terhadap delikueni Travis Hirschi (1969) merupakan jenis teorisasi jenis ini. Bagaimanapun, jenis teori ini telah menempatkan *peacemaking criminology* pada nada yang lebih umum dan memiliki ranah yang lebih luas dan lebih sedikit tersistematisasi. Hal ini tidak cenderung pada hipotesis Negara, maupun formulasi proposisi yang telah teruji. Teori dalam *peacemaking criminology* biasanya menghasilkan pengajuan nilai dalam system peradilan pidana (dimana, keadilan, dalam diformulasikan pada hipotesis dan proposisi). Berikut penjelasan-penjelasan terkait mengenai hal tersebut berdasarkan John Fuller, yang telah mengembangkan enam tahapan tingkatan *peacemaking criminology* terkait dengan system peradilan pidana. Enam pernyataan berikut dikutip dari Fuller (2003: 86-88) :

1. **Non-kekerasan.** *Peacemaking Criminology* merupakan yang pertama yang peduli dengan issue kekerasan. Contoh terbaik adalah dimana *peacemaking criminology* melihat kekerasan dalam mempertimbangkan hukuman mati. *Peacemaking Criminology* melawan keberadaan hukuman mati sebagai bagian dari kebijakan peradilan pidana. Kekerasan oleh Negara ini dipandang sebagai kesalahan sebagaimana kekerasan terhadap pelaku.
2. **Keadilan sosial.** Setiap kebutuhan dalam solusi peradilan pidana meliputi konsep dari keadilan sosial. Isu-isu seperti rasisme, seksisme dan ketidaksetaraan yang juga merupakan bagian dari kepedulian akan keadilan sosial. Sebagai contoh, dalam kasus pidana hukuman mati, pola bias rasial tampak selama ini. Ras pelaku dan ras korban menentukan pemberian hukuman mati. Kaum minoritas lebih kerap terkena hukuman mati daripada kaum kulit putih. Kaum minoritas memang bersalah dalam sejumlah kejahatan, namun prespektif *peacemaking* mengajukan perlawanan terhadap hukuman mati dalam lingkup keadilan sosial ketika terdapat sejumlah factor ekstralegal yang mempengaruhi pemberian hukuman
3. **Inklusi.** Idea dibalik inklusi ini sederhana. Konsep ini menyarankan agar system peradilan pidana lebih inklusif terhadap peran pengambil kebijakan

dalam komunitas. Dalam konsep formalisasi yang tinggi dalam peradilan pidana kita, pelaku ditempatkan bertentangan dengan Negara. Bahwa terdapat pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dalam kasus dan pihak yang dapat menawarkan perspektif dan alternatif yang dapat diterima. Perspektif Peacemaking menekankan bahwa kondisi inklusi tersebut lebih dapat memberikan kepuasan dan penyelesaian jangka panjang daripada penghukuman konvensional.

4. **Cara yang Benar.** Hal ini didasarkan atas hukum pidana yang dikembangkan untuk memastikan bahwa para praktisi system peradilan pidana tidak melanggar hukum dan hak-hak sipil pelaku. Peacemaking Criminology menyarankan cara benar dengan memastikan bahwa pelaku dan korban tidak dipaksa dalam penyelesaian kasus mereka. Dimana dibutuhkan jaminan atas pemeliharaan proses hukum atas penyelesaian kasus yang lebih kreatif dan efektif . Hingga kemudian kebijakan dan prosedur yang dijalankan oleh system peradilan pidana tidak harus mengorbankan efektifitas cara yang benar. Ketika pihak minoritas menjadi target, mereka mengalami penahanan yang tidak seharusnya dan digunakan sebagai bukti dalam pengembangan profil tersangka. Hal ini menjadi lingkaran setan ketika cara yang tidak benar berkontribusi pada pelanggaran atas keadilan sosial
5. **Kriteria yang Dapat Diketahui.** Dalam upaya untuk membuat korban, pelaku dan komunitas berpartisipasi dalam system peradilan pidana, pihak-pihak ini harus mengerti apa yang terjadi. Bahasa hukum secara umum hanya dimengerti oleh sebagian kalangan dan sepenuhnya hanya dimengerti oleh para pengacara. Konsep Peacemaking Criminology dalam hal ini merupakan upaya untuk memastikan seluruh pihak mengerti prosedur yang dibutuhkan. Hal ini termasuk upaya edukasi pihak- pihak terkait, baik pelaku, korban maupun masyarakat secara umum.
6. **Kategori Penting.** Ketika membahas mengenai kejahatan dan system peradilan pidana, Peacemaking Criminology bertujuan mengembangkan sudut pandang yang konsisten dan dapat diprediksi. Peacemaking Criminology menyatakan bahwa respon terhadap kejahatan harus

merefleksikan filosofi yang didasarkan pada hal yang bersifat non kekerasan dan keadilan sosial yang diperluas melalui system peradilan pidana. Korban, pelaku dan praktisi peradilan pidana, serta public, harus diperlakukan dengan hormat dan harga diri yang pantas didapatkan oleh masing-masing pihak. Hingga pada akhirnya, keputusan system peradilan pidana mengikut aksioma Kant, yakni “*Act only according to that maxim whereby you can at the same time will that it should become a universal law.*” Peacemaking Criminology bukanlah merupakan panduan yang sembarangan dan tidak konsisten, namun menyediakan kesetaraan yang sebenarnya dibawah hukum yang dikarakterisasi oleh pandangan appositif dari manusia.

Keenam konsep tersebut diharapkan mampu menjelaskan fenomena kriminologis yang ada dalam konflik bersenjata Israel- Palestine yang mengerakkan warga dunia dalam aksi solidaritas menembus blockade jalur Gaza dengan berbagai cara yang tidak menggunakan kekerasan sebagaimana ditunjukkan gerakan-gerakan sosial yang ada. Ketika lembaga-lembaga hokum dunia tidak mampu untuk menegakkan keadilan terhadap warga Jalur Gaza yang menderita dibawah pendudukan Israel, maka dibutuhkan langkah alternative dari warga sipil dunia untuk menegakkan keadilan dengan cara-cara non kekerasan sebagaimana karakter solusi akan permasalahan pidana yang diajukan pandangan Peacemaking Criminology.

Peacemaking Criminology berusaha memperluas perannya dalam disiplin ilmu dengan melihat pada isu-isu internasional seperti peran dan genosida dalam perjuangan internasional bagi hak-hak asasi manusia dan keadilan sosial dalam lingkup tersebut. Hal Pepinsky dan Richard Quinney merupakan pengarang utama dalam lingkup ini.⁷⁸ Kriminologi dalam arus utama secara tradisional difokuskan pada pembahasan kemiskinan sebagai variable yang terisolasi, dimana dampak-dampak yang ada dicirikan dengan eksplorasi pada ukuran terbatas atas variable dalam analisis multivariat. *Peacemaking Criminology* menawarkan sebuah

⁷⁸ <http://www.criminology.fsu.edu/crimtheory/conflict.htm>

perspektif alternative dimana dalam paradigma ini kemiskinan dilihat sebagai sebuah sumber penderitaan, serta dalam sebuah derajat merupakan sebuah “kejahatan” dari dalam dan dari hal tersebut. Kemiskinan dimaknai bukan sebagai variable yang terisolasi, namnu sebagai status utama dari realitas sosial fundamental yang menempatkan orang sebagai subjek yang hidup dalam penderitaan-penderitaan yang dapat merupakan perilaku kejahatan. Dari perspektif *peacemaking*, sebuah kunci yang didapat untuk mencegah kejahatan adalah, dalam jangka pendek, dengan mengurangi penyebab kejahatan, dan dalam jangka panjang, dengan cara ‘merangkul’ kejahatan itu sendiri.⁷⁹

2.2.5. Pendudukan Israel di Jalur Gaza sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Lembaga senior hak-hak asasi manusia PBB menyetujui resolusi yang menyebut serangan Israel sebagai “pelanggaran besar atas hak-hak asasi manusia”. Pihak militer Israel dituduh atas a) penggunaan bahan peledak di wilayah sipil di wilayah yang telah diketahui angkatan bersenjata akan menyebabkan dampak besar di kalangan warga sipil yang tidak bersalah, b) menggunakan senjata yang dilarang, seperti bom fosfor, c) menahan keluarga-keluarga Palestina, d) menyerang fasilitas kesehatan, termasuk membunuh 12 petugas ambulans di kendaraan yang telah ditandai, e) membunuh sejumlah besar polisi yang tidak memiliki peran militer.⁸⁰

Tuntutan yang ada bagi Israel bukan lagi tanggung jawab dibawah hukum kemanusiaan internasional sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi Jenewa, namun pada tanggung jawab komunitas internasional yang telah menyepakati tindakan yang menyebabkan berlanjutnya pelanggaran Israel atas hukum internasional. Israel telah melanggar 60 resolusi PBB serta berbagai upaya hukum dan diplomatik terkait hukum internasional terkait perluasan pendudukan illegal,

⁷⁹ Poverty and Peacemaking Criminology: Beyond Mainstream Criminology
John F. Wozniak
Published online: 18 July 2008
Springer Science+Business Media B.V. 2008
<http://www.springerlink.com/content/u48t75100285w211/fulltext.pdf?page=1>

⁸⁰ Demands grow for Gaza war crimes investigation. Retrieved March 2, 2010 from <http://www.guardian.co.uk/world/2009/jan/13/gaza-israel-war-crimes>

menyangkal hak untuk kembali dan melanjutkan pendudukan di Tepi Barat termasuk Jerusalem Barat, Jalur Gaza dan dataran tinggi Golan. Lusinan laporan dan investigasi telah menjadi bukti kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Israel, termasuk pembantaian, hukuman kolektif, pembongkaran rumah dan pembunuhan diluar aturan hokum dalam skala besar selama 62 tahun terakhir.

Pada tahun 2004, International Court of Justice (ICJ) mengeluarkan sebuah pernyataan hukum yang menyatakan tembok yang dibangun Israel di Tepi Barat bersifat ilegal dan bertentangan dengan hukum internasional. Laporan setebal 54 halaman tersebut meliputi pendudukan illegal serta pelanggaran Israel atas Konvensi Jenewa Keempat selama 42 tahun terakhir serta mengingatkan akan kesepakatan hokum internasional yang memiliki tanggung jawab untuk, “tidak mengakui kondisi illegal yang dihasilkan dari pembangunan tembok dan tidak memberikan bantuan dalam memelihara situasi yang diakibatkan oleh konstruksi tersebut” dan "memastikan Israel memenuhi aturan hukum internasional sebagaimana yang termuat dalam konvensi tersebut”. Konvensi Jenewa dibuat dan disepakati oleh negara-negara di dunia pada tahun 1949 dibawah tekanan popular sebagai alat hokum untuk memastikan kejahatan terhadap kemanusiaan di seluruh dunia yang terjadi pada Perang Dunia Kedua tidak akan pernah terjadi lagi. Prinsip-prinsip tersebut telah dilanggar oleh Israel secara kontinyu.⁸¹ Pakar hukum kenamaan Afrika Selatan, Richard Goldstone, mengeluarkan laporan bagi Dewan Hak Asasi Manusia PBB terkait pelanggaran hak-hak asasi manusia pada dan selama perang Gaza. N.Y Times mendeskripsikan laporan tersebut

“...The report called Israel’s military assault on Gaza “a deliberately disproportionate attack designed to punish, humiliate and terrorize a civilian population, radically diminish its local economic capacity both to work and to provide for itself, and to

⁸¹ Russell Tribunal aims to hold the international community to account
Frank Barat, *The Electronic Intifada*, 1 March 2010. Retrieved March 2, 2010 on
<http://electronicintifada.net/v2/article11104.shtml>

force upon it an ever increasing sense of dependency and vulnerability.”⁸²

Laporan Goldstone merupakan laporan terbaru yang paling komprehensif dan berasal dari kumpulan laporan lembaga-lembaga independen yang bekerja di kawasan Jalur Gaza pada masa agresi. Laporan tersebut menjabarkan bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan, mulai dari kekerasan fisik, psikis serta bentuk-bentuk upaya pelumpuhan ekonomi yang berusaha dilakukan oleh pendudukan Israel terhadap warga Jalur Gaza. Laporan ini menjadi kontroversi di pihak Israel, Palestina maupun PBB, karena implementasinya dinilai akan mengganggu peta perdamaian di Timur Tengah.

“...The report focussed on 36 cases that it said constituted a representative sample. In 11 of these episodes, it said the Israeli military carried out direct attacks against civilians, including some in which civilians were shot “while they were trying to leave their homes to walk to a safer place, waving white flags.”⁸³

Sekjen PBB Ban Ki-Moon memberikan pernyataan terkait ‘kekejaman’ tersebut and Ketua Majelis Umum PBB menuduh Israel melanggar hukum internasional. Perwakilan khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia dalam wilayah pendudukan Palestina, Profesor Richard Falk mengkarakterisasi serangan Israel sebagai sesuatu yang mengandung, *"severe and massive violations of international humanitarian law."* (pelanggaran besar-besaran terhadap hukum internasional)

⁸² Terjemahan bebas : Laporan tersebut menyebutkan bahwa serangan militer Israel terhadap Gaza merupakan tindakan yang bertujuan untuk menghukum, menghinakan dan menteror populasi sipil, yang secara radikal menghilangkan kapasitas ekonomi lokal baik untuk bekerja maupun memenuhi kebutuhan diri, dan memaksa untuk meningkatkan rasa keteregantungan dan kerentanan

⁸³ Terjemahan bebas : Laporan tersebut berfokus pada 36 kasus yang didasarkan pada jumlah sampel yang mampu mewakili. Dalam 11 episode ini, dinyatakan bahwa serangan yang dilakukan Israel dilakukan pada warga sipil, termasuk warga sipil yang ditembak “ketika mereka mencoba meninggalkan rumah mereka, dengan melambaikan bendera putih. Source: UN Report Finds Evidence of Israeli, Palestinian War Crimes, Seeks International Criminal Court Referral. Retrieved March 2, 2010 on http://www.richardsilverstein.com/tikun_olam/2009/09/15/un-report-finds-evidence-of-israeli-palestinian-war-crimes-seeks-international-criminal-court-referral/

Jaksa Internasional Francis A Boyle menuduh PBB menciptakan permasalahan, pertama dengan mendeskripsikan pengelompokan ‘ilegal’ pada Palestine Mandate yang membawa pada sebuah kesalahan penempatan bagi populasi asli Arab. Dia menyatakan bahwa PBB tidak pernah dapat dipercaya untuk melakukan hal yang benar bagi warga Palestina mengingat pengabaian yang telah mereka lakukan pada pendudukan Negara tersebut selama enam puluh tahun. Boyle menyatakan, “PBB tidak impoten. Lembaga tersebut memilih untuk diam karena tercipta dari budak-budak pengecut Amerika Serikat”. Professor George Bisharat dari University of California menyatakan bahwa PBB berhutang pada warga Palestine sebuah hutang moral terkait ketidakadilan dan pelanggaran hak-hak warga Palestina selama enam decade terakhir ini. Pakar politik Norman G. Finkelstein menyatakan rasa frustasinya atas ketiadaan tindakan dari para pimpinan dunia dan ketidakmampuan PBB dalam menegakkan resolusinya sendiri. Finkelstein menyatakan :

*"The world does nothing...Most states are led by cowards and slaves of the United States. The only ones showing any courage right now are the UN agencies in Gaza. Their representatives are telling the truth."*⁸⁴

Dr. Mohammad Marandi, kepala Department of North American Studies di Tehran University menyatakan :

*"While the UN staff in Gaza are doing heroic work...their statements are not reflected by the higher authorities of the UN or the countries that are represented there."*⁸⁵

Serangan Israel ke Jalur Gaza memicu protes besar-besaran anti-Israel di seluruh dunia. Kole Kilibarda dari organisasi Toronto-based Coalition Against Israeli Apartheid (CAIA), menyatakan :

⁸⁴ Terjemahan bebas : Dunia tidak melakukan apapun..Banyak negara dipimpin oleh budak yang berlutut pada Amerika Serikat. Pihak yang saat ini menunjukkan keteguhan saa ini hanyalah badan PBB di Gaza. Perwakilan mereka sedang mengatakan kebenaran

⁸⁵ Terjemahan bebas: Ketika petugas PBB di Gaza sedang melakukan kerja heroic..pernyataan mereka tidak merefleksikan otoritas yang lebih tinggi di PBB, ataupun negara-negara yang mereka wakili disana

"It is a mistake to view the UN in monolithic terms, and in no way should its actions or inaction serve as a substitute for individuals to organize themselves in their communities to fight and struggle for what they see as just,"⁸⁶

Kilibarda selanjutnya menyatakan bahwa perubahan sosial tidak akan pernah berasal dari PBB dimana lembaga tersebut hanya bertugas mengatur legitimasi gerakan-gerakan social yang telah berjuang selama beberapa dekade dan abad.

Donatella Rovera, ketua investigasi Amnesty International terkait konflik Israel dan Gaza menyatakan dukungan permintaan atas laporan dan investigasi bagi Sekjen PBB kepada Dewan Keamanan. Rovera menyatakan, *"The UN Security Council and other UN bodies must now take the steps necessary to ensure that the victims receive the justice and reparation that is their due and that perpetrators don't get away with murder."*

Selain itu, laporan Goldstone memperkuat kebenaran pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terkait kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Jalur Gaza, yang dideskripsikan sebagai berikut,

" The report's findings are consistent with those of Amnesty International's own field investigation into the 22-day conflict from 27 December 2008 to 18 January 2009, during which some 1,400 Palestinians and nine Israelis were killed. Most of the Palestinians killed by Israeli forces were unarmed civilians, including some 300 children."⁸⁷

Pengepungan Israel atas Jalur Gaza tidak terlihat oleh dunia luar karena Jerusalem menolak untuk mengizinkan pekerja bantuan kemanusiaan, reporter, dan fotografer untuk masuk ke Jalur Gaza. Hal ini dapat disamakan dengan

⁸⁶ Terjemahan bebas: Merupakan sebuah kesalahan untuk memandang PBB dalam terminology monolitik, dan tidaklah memandang adanya tindakan ataupun tidak sebagai sebuah pengganti individual dalam mengorganisir komunitas mereka untuk melawan dan berjuang untuk apa yang mereka lihat sebagai keadilan

⁸⁷ Terjemahan bebas : Temuan dalam laporan tersebut konsisten dengan investigasi lapangan Amnesty Internasional dalam konflik 22 hari sejak 27 Desember 2008 hingga 18 Januari 2009, yang menyebutkan bahwa sekitar 1400 warga Palestine dan 9 warga Israel terbunuh. Warga Palestina yang dibunuh oleh militer Israel umumnya merupakan warga sipil tak bersenjata, termasuk 300 anak-anak. Source: UN must ensure Goldstone inquiry recommendations are implemented. 15 September 2009. Retrieved March 2, 2010 on <http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/israel-gaza-implementation-un-fact-finding-mission-recommendations-crucial-justi>

rezim Apartheid di Afrika Selatan yang bahkan dianggap menyamai system ghetto pada masa Nazi. Utusan khusus PBB untuk wilayah Palestine, Professor Richard Falk, menyatakan bahwa apa yang sedang dilakukan Israel terhadap 1.5 juta penduduk Gaza merupakan sebuah “kejahatan terhadap kemanusiaan” (*a crime against humanity*).⁸⁸

*Falk, who is Jewish, has condemned the collective punishment of the Palestinians in Gaza as “a flagrant and massive violation of international humanitarian law as laid down in Article 33 of the Fourth Geneva Convention.” He has asked for “the International Criminal Court to investigate the situation, and determine whether the Israeli civilian leaders and military commanders responsible for the Gaza siege should be indicted and prosecuted for violations of international criminal law.”*⁸⁹

Negara Spanyol pun turut serta dalam upaya investigasi kasus di Jalur Gaza terkait kematian 15 warga sipil Palestina yang sebagian besar adalah bayi dan anak-anak, yang tewas akibat bomb pesawat angkatan udara yang menargetkan Jalur Gaza.⁹⁰ Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Ekuador menyebut :

⁸⁸Menurut Statuta Roma, "kejahatan terhadap kemanusiaan" berarti salah satu tindakan berikut ketika dilakukan sebagai bagian dari serangan yang luas atau sistematis diarahkan terhadap penduduk sipil, yakni berupa serangan: (a) Pembunuhan; (b) Pembasmian; (c) perbudakan; (d) Deportation or forcible transfer of population; (d) Deportasi atau pemindahan paksa penduduk; (e) Penahanan atau perampasan berat kebebasan fisik yang melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional; (f) Penyiksaan; (g) Penghilangan hilangnya orang; (h) Kejahatan apartheid; (i) Lain-lain tindakan yang tidak manusiawi dari karakter yang serupa dengan sengaja menyebabkan penderitaan yang besar, atau cedera serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik. Lebih lanjut dapat dilihat di situs <http://www.preventgenocide.org/law/icc/statute/part-a.htm>

⁸⁹ Falk, yang merupakan Yahudi, menyebutkan hukuman kolektif terhadap warga Palestina di Gaza sebagai, “pelanggaran besar-besaran atas hukum internasional berdasarkan Artikel 33 dari Konvensi Jenewa Keempat.” Dia meminta Mahkamah Internasional untuk menginvestigasi situasi, dan menentukan apakah pimpinan sipil Israel dan komandan militer yang bertanggung jawab atas pengepungan Gaza harus dituntut atas pelanggaran hukum pidana internasional. Source: Israel's 'Crime Against Humanity'. Retrieved March 2, 2010 on http://www.alternet.org/world/113143/israel%27s_%27crime_against_humanity%27/. Lihat juga <http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2009/03/2009323225126719889.html>, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/7774988.stm>

⁹⁰ Spain investigates claims of Israeli crimes against humanity in Gaza. Retrieved March 2, 2010 on <http://www.guardian.co.uk/world/2009/jan/29/spain-israel-gaza-crimes-humanity>. Lihat juga <http://edition.cnn.com/2009/WORLD/europe/01/29/spain.israel.gaza.lawsuit/index.html>

"Israel's military offensive in the Gaza Strip and called for a global probe of alleged "crimes against humanity."⁹¹ Turkey's prime minister on Sunday denounced Israel's air assault on Hamas targets in the Gaza Strip as a "crime against humanity" and called for them to end. Recep Tayyip Erdogan accused Israel of using "disproportionate force" and said the attacks were a "blow to peace." "To go and bomb these defenseless people, and to openly say that this operation will be a long-lasting one, that it will be this or that, to me, is a serious crime against humanity,"⁹²

Sejumlah aktivis partai Islam di Bangladesh menyelenggarakan demonstrasi terkait invasi Israeli ke Jalur Gaza untuk menghentikan tindakan Israel yang mereka sebuah sebagai, "crime against humanity."⁹³ Sebuah harian berbahasa Inggris, menceritakan serangan kala itu sebagai berikut :

On December 27, 2008, Israel launched Operation Cast Lead, a massive assault on Gaza. 22 days later, around 1,400 Palestinians, including over 300 children, and 13 Israelis were dead; about 5,000 Palestinians were wounded. Israeli forces bombed and shelled schools, medical centers, hospitals, ambulances, United Nations buildings (including UN schools), power plants, sewage plants, roads, bridges and civilian homes. This was described in much of the press as hitting "Hamas targets" (David Gardner, "U.S. accused of white phosphorus against Taliban," Daily Mail, May 11, 2009).⁹⁴

⁹¹Ecuador accuses Israel of crimes against humanity. Retrieved March 2, 2010 on <http://www.ynetnews.com/articles/0.7340.L-3651991.00.html>

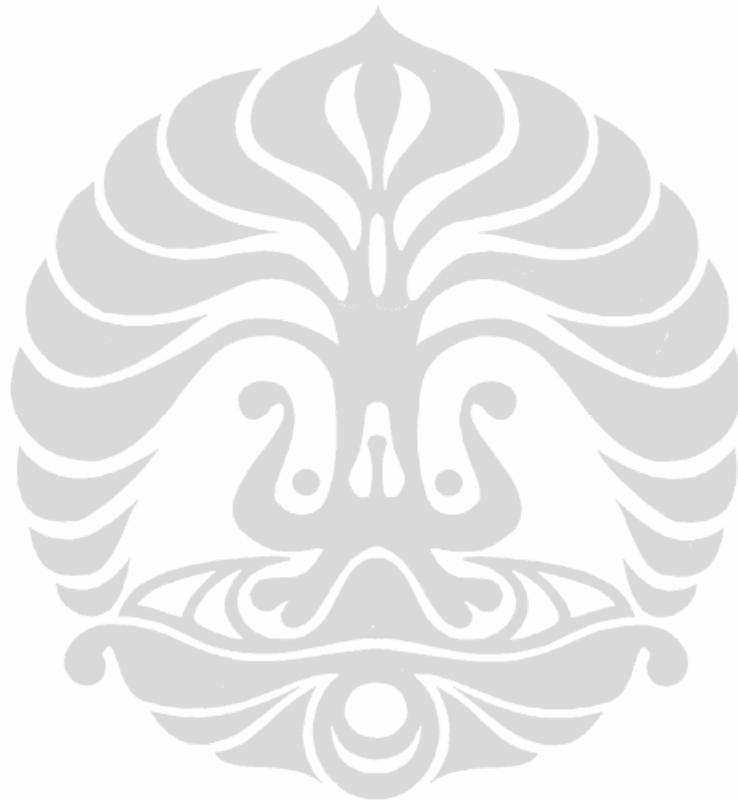
⁹² Serangan militer Israel terhadap Jalur Gaza merupakan tuduhan global terhadap, "Kejahatan Terhadap Kemanusiaan". Perdana menteri Turki juga mengucapkan hal serupa. Recep Tayyip Erdogan menyebut hal tersebut sebagai "kekuatan yang tidak berimbang" dan menyatakan bahwa serangan tersebut "meniup perdamaian". Menyerang dan membom pihak yang tidak dapat melawan dan secara terbuka menyatakan bahwa hal tersebut akan dilakukan dalam jangka waktu panjang, bagi saya merupakan sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan yang serius. Source:

Turkey says Gaza attacks a crime against humanity. Retrieved March 2, 2010 on <http://www.jpost.com/International/Article.aspx?id=126596>

⁹³ Bangladeshis protest against Israeli "crimes against humanity". Retrieved March 2, 2010 from <http://www.topnews.in/bangladeshis-protest-against-israeli-crimes-against-humanity-2111022>

⁹⁴ Terjemahan bebas : Pada bulan Desember 2008, Israel meluncurkan Operasi Cast Lead, sebuah serangan besar-besaran ke Gaza. 22 hari kemudian, sekitar 1400 warga Palestina, termasuk lebih dari

Demikianlah kondisi yang terjadi di kawasan konflik tersebut. Penjelasan lebih lanjut mengenai pelanggaran yang dilakukan serta perangkat hukum internasional yang dilanggar dapat dilihat di **Lampiran 5**.



*300 anak-anak dan 13 warga Israel tewas ; sekitar 5000 warga Palestina hidup dalam pengepungan bersenjata. Kekuatan Israel membom dan menghancurkan sekolah, rumah sakit, ambulans, gedung-gedung PBB (termasuk sekolah PBB), pembangkit listrik, pengelolaan sampah, jalan-jalan, jembatan dan rumah-rumah warga sipil. Hal ini digambarkan oleh media massa sebagai pennyerangan dengan "Target Hamas". (David Gardner, "U.S. accused of white phosphorus against Taliban," *Daily Mail*, May 11, 2009).*